



# **PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG HIRIPAU DISTRIK MIMIKA TIMUR TAHUN 2025**

**"Membangun dari Kampung Ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota"**



## KATA PENGANTAR PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyelenggaraan-Nya, proses penyusunan **Profil dan Potensi Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis mendukung akselerasi pembangunan kampung yang berorientasi pada data akurat dan informasi faktual hasil observasi serta pengumpulan data lapangan. Melalui proses yang sistematis, terverifikasi dan partisipatif, dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kampung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Atas nama Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM), kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) atas kepercayaan yang diberikan kepada IPPM sebagai lembaga penyusun. Kepercayaan ini merupakan tanggungjawab besar yang kami emban dalam mendukung pembangunan kampung yang lebih terarah, partisipatif dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa proses penyusunan dokumen ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik dalam pengumpulan data, mobilisasi ke lapangan, maupun koordinasi lintas pihak. Namun berkat kerja keras tim serta dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, seluruh tahapan dapat dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan untuk menghasilkan dokumen yang komprehensif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas PMK dan staf, Kepala Distrik Mimika Timur beserta seluruh staf, Kepala Kampung Hiripau dan aparat kampung, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi, waktu dan bantuan selama proses pengumpulan data berlangsung. Kontribusi semua pihak menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyusunan dokumen ini.

Kami juga sangat mengharapkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan dokumen pada tahap berikutnya. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan demi terwujudnya pembangunan kampung di kabupaten Mimika yang lebih maju dan mandiri.

Jayapura, 15 Desember 2025  
Direktur IPPM,

**Yohannes Rahail**

## KATA PENGANTAR KEPALA KAMPUNG

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, Profil Kampung Hiripau ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai upaya bersama Pemerintah Kampung Hiripau dalam menghadirkan data dan informasi yang akurat, terintegrasi, serta mencerminkan kondisi riil kehidupan masyarakat kampung.

Penyusunan Profil Kampung Hiripau bertujuan untuk menggambarkan secara utuh kondisi kependudukan, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi kampung. Profil ini diharapkan menjadi basis data dan rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan kampung, penyusunan RPJM Kampung, RKP Kampung, serta sebagai bahan pendukung dalam musyawarah kampung dan koordinasi dengan pemerintah distrik dan kabupaten.

Dokumen Profil Kampung ini juga memiliki manfaat strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan tersedianya data yang valid dan mutakhir, Pemerintah Kampung Hiripau dapat merancang program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi kampung.

Saya berharap Profil Kampung Hiripau ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai alat perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kampung. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan kampung yang berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat Kampung Hiripau.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kampung Hiripau ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kampung Hiripau dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Mimika, 16 Desember 2025  
Kepala Kampung Hiripau,

**Bonefasius Pawe**

## KATA PENGANTAR KEPALA DISTRIK

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, penyertaan, dan tuntunan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Hiripau** di wilayah Distrik Mimika Timur dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi pembangunan kampung yang berbasis pada data dan informasi faktual di lapangan, sehingga setiap perencanaan dan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kapasitas Pemerintah Kampung, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi riil, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakat kampung. Melalui Profil Kampung ini, diharapkan Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki rujukan yang jelas dan komprehensif dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan ke depan.

Atas tersusunnya dokumen ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah bekerja secara profesional sebagai tim penyusun. Dengan metodologi yang terstruktur, berbasis bukti, serta didukung oleh proses pengumpulan data lapangan yang komprehensif, IPPM telah menghasilkan dokumen yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan dan bermanfaat sebagai dasar perencanaan pembangunan kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta seluruh masyarakat Kampung Hiripau di Distrik Mimika Timur yang telah memberikan dukungan, data, informasi, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan dokumen ini berlangsung.

Semoga Dokumen Profil dan Potensi Kampung Hiripau ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan kampung yang mandiri, produktif dan berkeadilan.

Mimika, 18 Desember 2025  
Plt. Kepala Distrik Mimika Timur,

**Bakri Athoriq, S.STP**

## SAMBUTAN KEPALA DINAS PMK MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat pembangunan kampung yang berbasis pada data yang akurat, informasi faktual serta pemetaan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud nyata kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta mitra profesional yang berkompeten. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Distrik Mimika Timur beserta jajaran, Kepala Kampung Hiripau bersama seluruh aparat kampung, serta masyarakat Kampung Hiripau yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan aktif selama proses pengumpulan dan verifikasi lapangan. Kontribusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi objektif dan dinamika nyata kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) selaku tim penyusun. Melalui pendekatan metodologis yang terstruktur, IPPM telah melaksanakan proses penyusunan dokumen ini dengan observasi langsung, kajian analitis, serta verifikasi data secara berjenjang. Meskipun menghadapi berbagai kendala teknis dan tantangan lapangan, IPPM mampu menyelesaikan dokumen ini secara baik, akurat dan sesuai dengan kaidah penyusunan profil kampung. Dedikasi tersebut merupakan kontribusi penting dalam mendukung percepatan pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejalan dengan terbitnya dokumen ini, kami berharap penyusunan profil dan potensi kampung dapat diperluas dan direplikasi ke seluruh kampung di Kabupaten Mimika. Dengan tersedianya basis data kampung yang lengkap, mutakhir, dan terpadu, setiap kampung diharapkan mampu berkembang sebagai model perencanaan pembangunan berbasis data, serta menjadi rujukan dalam pengembangan inovasi, penguatan tata kelola pemerintahan kampung, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Dokumen Profil dan Potensi Kampung ini memiliki nilai strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan, baik di tingkat kampung, distrik, maupun kabupaten. Data yang lengkap dan komprehensif akan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, serta penguatan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan dapat memperkuat identitas kampung serta membuka ruang pengembangan potensi unggulan yang berdaya saing.

Akhir kata, kami berharap agar dokumen ini terus diperbarui secara berkala dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini pada masa mendatang. Semoga kerja kolaboratif ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, berdaya saing, serta berkontribusi nyata bagi terwujudnya Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025  
Kepala Dinas,

**Abraham Y. Kateyau, SE., MH**



## SAMBUTAN BUPATI MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyelenggaraan dan penyertaan-Nya, Kabupaten Mimika terus berbenah dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan “Membangun dari kampung ke kota”, maka **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Hiripau** dapat diselesaikan sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, arah pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang mendasar. Kebijakan Otonomi Khusus memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara lebih kontekstual, partisipatif, serta selaras dengan karakter sosial, budaya dan kondisi geografis masyarakat Papua.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Dokumen strategis ini menegaskan tiga pilar utama pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, sebagai upaya mempercepat transformasi pembangunan Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus menjawab keteringgalan kualitas sumber daya manusia yang bersifat struktural.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, kita menyadari bahwa tantangan pembangunan masih bersifat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan antar wilayah masih nyata, terutama antara kawasan perkotaan yang berkembang pesat dengan kampung-kampung di wilayah pedalaman dan pesisir yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kuatnya peran adat dan tradisi menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat kampung.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat ditentukan oleh ketersediaan data dan informasi kampung yang akurat, lengkap dan mutakhir. Selama ini, basis data kampung yang terpadu belum sepenuhnya tersedia, sehingga perencanaan pembangunan sering kali belum didukung oleh landasan teknokratis yang kuat. Untuk itu penyusunan profil dan potensi kampung menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai fondasi pembangunan yang objektif, terukur dan berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi pembangunan tahun 2024-2029, “Mewujudkan Mimika yang Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing menuju Gerbang Emas”, menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dimulai dari kampung dengan pendekatan “Membangun dari Kampung ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota.” Pendekatan ini menempatkan kampung sebagai titik awal pembangunan wilayah, dengan perencanaan yang komprehensif, partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Penyusunan profil dan potensi kampung berbasis satu data merupakan langkah strategis dalam memperkuat implementasi pendekatan tersebut.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penyusunan dokumen ini. Dengan tersusunnya dokumen Profil dan Potensi Kampung Hiripau ini, Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki landasan yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan kampung secara sistematis, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Data yang tersaji tidak hanya menjadi pijakan perencanaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat identitas kampung, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing kampung secara berkelanjutan.

Akhir kata, saya berharap dokumen ini dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan dan terus diperbarui secara berkala. Semoga upaya ini menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025

Bupati,

**Johannes Rettob, S.Sos., MM**

## DAFTAR ISI

|                                                              | Halaman |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Kata Pengantar Penyusun .....                                | ii      |
| Kata Pengantar Kepala Kampung .....                          | iii     |
| Kata Pengantar Kepala Distrik .....                          | iv      |
| Sambutan Kepala Dinas PMK .....                              | v       |
| Sambutan Bupati Mimika .....                                 | vii     |
| Daftar Isi .....                                             | x       |
| Daftar Tabel .....                                           | xi      |
| Daftar Gambar .....                                          | xii     |
| <br>Bagian I. <b>PENDAHULUAN</b> .....                       | <br>1   |
| A. Latar Belakang .....                                      | 1       |
| B. Tujuan .....                                              | 2       |
| C. Manfaat .....                                             | 3       |
| Bagian II. <b>METODOLOGI</b> .....                           | 5       |
| Bagian III. <b>PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG</b> .....          | 10      |
| A. Keadaan Wilayah Kampung .....                             | 10      |
| 1. Sejarah .....                                             | 10      |
| 2. Keadaan Wilayah .....                                     | 12      |
| B. Keadaan Perumahan .....                                   | 14      |
| 1. Tipe dan Kondisi Bangunan Rumah .....                     | 14      |
| 2. Pola Permukiman .....                                     | 14      |
| 3. Kepemilikan Rumah .....                                   | 15      |
| 4. Luas Bangunan dan Jumlah Kamar .....                      | 15      |
| 5. Ketersediaan Fasilitas Dasar Rumah Tangga .....           | 16      |
| C. Kependudukan .....                                        | 16      |
| 1. Suku-suku di Kampung .....                                | 16      |
| 2. Nilai dan Kearifan Lokal .....                            | 18      |
| 3. Keadaan Penduduk .....                                    | 20      |
| 4. Migrasi dan Mobilitas Penduduk .....                      | 25      |
| D. Pendidikan .....                                          | 28      |
| 1. Konsep Masyarakat tentang Pendidikan .....                | 28      |
| 2. Kelembagaan Pendidikan .....                              | 31      |
| 3. Keadaan Guru dan Murid .....                              | 33      |
| 4. Partisipasi Siswa dalam Proses Belajar-Mengajar .....     | 34      |
| 5. Pendidikan NonFormal .....                                | 35      |
| E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana .....              | 36      |
| 1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit dan Penyakit ..... | 36      |

|            |                                                      |    |
|------------|------------------------------------------------------|----|
|            | 2. Kesehatan .....                                   | 38 |
|            | 3. Gizi .....                                        | 40 |
|            | 4. Keluarga Berencana .....                          | 41 |
|            | F. Ekonomi Masyarakat .....                          | 42 |
|            | 1. Aktivitas Penduduk .....                          | 42 |
|            | 2. Kepemilikan Modal .....                           | 43 |
|            | 3. Kelembagaan Ekonomi .....                         | 44 |
|            | 4. Harga Barang dan Bahan Makanan .....              | 44 |
|            | 5. Potensi dan Peluang Ekonomi .....                 | 45 |
|            | 6. Tingkat Kesejahteraan .....                       | 46 |
|            | G. Keamanan dan Ketertiban .....                     | 46 |
|            | 1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban .....    | 47 |
|            | 2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban .....  | 47 |
|            | H. Kelembagaan Kampung .....                         | 48 |
|            | 1. Lembaga pemerintah .....                          | 48 |
|            | 2. Lembaga kemasyarakatan.....                       | 49 |
|            | 3. Lembaga Politik .....                             | 50 |
|            | 4. Lembaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) ..... | 51 |
|            | I. Sarana Prasana .....                              | 52 |
|            | 1. Transportasi dan Komunikasi .....                 | 52 |
|            | 2. Air Bersih dan Sanitasi .....                     | 53 |
|            | 3. Penerangan / Energi .....                         | 53 |
|            | 4. Pendidikan .....                                  | 54 |
|            | 5. Kesehatan .....                                   | 54 |
|            | 6. Ekonomi .....                                     | 55 |
|            | 7. Peribadatan .....                                 | 56 |
|            | 8.Olahraga dan Rekreasi .....                        | 57 |
| Bagian IV. | <b>PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG</b> .....           | 58 |
|            | A. Infrastruktur Kampung Berstandar Kota .....       | 58 |
|            | B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal .....    | 58 |
|            | C. SDM, Budaya, dan Lingkungan Berkelanjutan .....   | 59 |
| Bagian V.  | <b>PENUTUP</b> .....                                 | 61 |
|            | Daftar Pustaka .....                                 | 63 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                           | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 3.1 Nama-nama Marga di Kampung Hiripau .....                                        | 17      |
| Tabel 3.2 Distribusi Penduduk kampung Hiripau menurut Umur Tahun 2025 ....                | 21      |
| Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Hiripau menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 ..... | 23      |
| Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kampung Hiripau menurut Matapencaharian Tahun 2025 .....    | 23      |
| Tabel 3.5 Distribusi Penduduk Kampung Hiripau menurut Agama Tahun 2025 ..                 | 25      |
| Tabel 3.6 Distribusi Harga Bahan Pokok Kampung Hiripau Tahun 2025 .....                   | 45      |
| Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota Di Kampung Hiripau .....              | 58      |
| Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal Di kampung Hiripau .....     | 59      |
| Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan Di kampung Hiripau .....    | 59      |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                        | Halaman |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Peta Titik Lokasi Kampung Hiripau .....     | 9       |
| Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kampung Hiripau ..... | 48      |

## BAGIAN I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Provinsi Papua yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, maka kebijakan pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan mendasar. Kebijakan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi Papua, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara kontekstual dan partisipatif sesuai karakteristik sosial, budaya dan geografis daerah.

Sebagai kelanjutan dari kebijakan Otonomi Khusus tersebut, pemerintah pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). RIPPP menekankan tiga (3) pilar utama pembangunan yakni “Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif”. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat transformasi pembangunan yang berpihak pada rakyat Papua secara responsive, menyeluruh dan berkelanjutan, dengan mengatasi ketertinggalan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua yang selama ini terjadi secara struktural dan sistemik.

Di Kabupaten Mimika, tantangan pembangunan masih sangat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih tinggi, terutama antara daerah perkotaan yang relatif maju dengan kampung-kampung di pedalaman dan wilayah pinggiran yang masih tertinggal (dataran pesisir dan pegunungan). Kondisi geografis yang sulit, rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, keterbatasan infrastruktur, dan kuatnya keterikatan masyarakat terhadap norma-norma adat dan tradisi lokal turut mempengaruhi lambatnya proses peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat bergantung pada kemampuan memahami potensi dan permasalahan kampung secara lebih mendalam, faktual dan berbasis data yang akurat. Namun hingga saat ini belum tersedia satu basis data kampung yang lengkap, terpadu dan terbarukan yang dapat digunakan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan kampung secara objektif, terukur dan berkelanjutan.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi-misi pembangunan tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Mimika yang responsif, energik, transparan, terampil, objektif dan berdaya saing menuju Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera), telah menetapkan arah kebijakan “Membangun dari Kampung ke Kota”, dengan pendekatan “Membangun Kampung Rasa Kota”. Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan yang berbasis wilayah, komprehensif, partisipatif dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi pendekatan tersebut adalah menyusun profil dan potensi kampung berbasis kontekstual kampung di kabupaten Mimika.

Dengan adanya basis data kampung yang komprehensif dan selalu diperbarui, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menyelenggarakan pembangunan kampung secara lebih sistematis, terukur dan berkelanjutan. Data ini berfungsi sebagai pijakan teknokratis yang kuat, sekaligus membuka ruang kolaborasi antar-lembaga serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat kampung dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil dan potensi lokal.

Selanjutnya, basis data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media *branding* kampung, sehingga tiap wilayah memiliki ruang untuk menonjolkan keunikan dan potensi khasnya baik dalam aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian pembangunan kampung di Kabupaten Mimika tidak hanya sebatas upaya pemerataan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya saing lokal yang berakar pada identitas masing-masing kampung.

Melalui kegiatan penyusunan profil dan potensi kampung yang terintegrasi dalam basis data tersebut, diharapkan terbangun pijakan yang kokoh menuju terwujudnya kampung yang mandiri, produktif dan berdaya saing. Upaya ini merupakan bagian dari gerakan besar untuk mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai “Gerbang Emas”, yakni kabupaten yang sehat, cerdas dan sejahtera, dengan masyarakat serta keluarga yang berkualitas.

## **B. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini, adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan kondisi riil kampung secara menyeluruh, mencakup aspek kependudukan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur;
2. Menggali potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi dan daya saing kampung;
3. Menyediakan data dasar yang akurat dan terintegrasi sebagai bahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan kampung;
4. Menjadi fondasi untuk pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, berkeadilan dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung.

### **C. Manfaat**

Penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah
  - a. Penyediaan data akurat dan terpadu berbasis kampung  
Memberikan basis data yang lengkap, mutakhir dan terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan program pembangunan kampung secara obyektif dan terukur.
  - b. Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran  
Memungkinkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat kampung berdasarkan kondisi dan potensi riil di lapangan.
  - c. Penguatan tata kelola pemerintahan kampung  
Meningkatkan kapasitas pemerintah kampung dan distrik dalam menjalankan fungsi administratif, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan transparan berbasis data
  - d. Mempercepat pelaksanaan program strategis daerah dan nasional  
Mendukung pencapaian visi pembangunan daerah 2025-2030 (Gerbang Emas) serta program nasional seperti RIPPP (Papua sehat, cerdas dan produktif) melalui intervensi yang berbasis data dan spasial.
  - e. Mendukung sistem monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis bukti

Menyediakan alat ukur dan indikator yang valid untuk memantau capaian pembangunan kampung secara berkala dan berkelanjutan.

## 2. Masyarakat

### a. Peningkatan akses terhadap program dan layanan publik

Masyarakat akan lebih mudah teridentifikasi dan terakomodasi dalam program pembangunan karena pemerintah memiliki data yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan mereka.

### b. Pemberdayaan berbasis potensi lokal

Masyarakat akan lebih terdorong mengembangkan potensi kampung (SDA, budaya dan ekonomi lokal) sebagai basis pemberdayaan dan kemandirian.

### c. Partisipasi aktif dalam pembangunan

Dengan keterlibatan langsung dalam proses pendataan dan pemetaan, masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap pembangunan yang dilakukan.

### d. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan kampung

Data yang terbuka dan mudah diakses akan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat bagi proses pembangunan dan mendorong kontrol sosial yang sehat.

### e. Percepatan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup

Dengan adanya intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, masyarakat akan memperoleh manfaat nyata seperti peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

## BAGIAN II. METODOLOGI

Metodologi penyusunan Profil Kampung Hiripau dirancang untuk menjamin bahwa data dan informasi yang dihasilkan bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, serta relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kampung, distrik dan kabupaten. Pendekatan metodologis ini mengacu pada prinsip perencanaan pembangunan berbasis data, partisipasi masyarakat dan sinkronisasi lintas sektor sesuai kerangka perencanaan Pemerintah Kabupaten Mimika.

### A. Pendekatan dan Metode Penyusunan

Penyusunan Profil Kampung Hiripau menggunakan metode deskriptif dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi riil kampung, baik dari sisi data objektif maupun dinamika sosial, budaya, kelembagaan, serta potensi sumber daya lokal.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

#### 1. Pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat kampung sebagai subjek pembangunan melalui pelibatan aktif aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda serta unsur masyarakat lainnya. Pelibatan ini dilakukan dalam proses pengumpulan, klarifikasi dan pembahasan data agar profil kampung mencerminkan kondisi riil dan aspirasi masyarakat.

#### 2. Pendekatan berbasis data primer dan sekunder

Penyusunan profil kampung memadukan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah kampung, distrik dan perangkat daerah. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kelengkapan, ketepatan serta konsistensi data.

#### 3. Validasi melalui FGD Kampung

Seluruh data dan informasi yang dihimpun dilakukan proses validasi melalui FGD tingkat kampung sebagai forum klarifikasi, penyepakatan dan penguatan legitimasi data secara sosial dan administratif.

## **B. Prinsip Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Hiripau dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Spesifik, yaitu data yang dihimpun mampu menggambarkan indikator pembangunan kampung secara jelas dan terarah sesuai konteks lokal.
2. Dapat dipercaya, yaitu seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dilakukan secara bertanggung jawab dan terukur agar mencerminkan kondisi sebenarnya.
3. Dapat diukur, yaitu data disusun berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi, dan satuan ukuran yang merujuk pada standar yang diakui sehingga memungkinkan perbandingan antar waktu.
4. Relevan, yaitu data yang dikumpulkan memiliki nilai guna langsung bagi perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan kampung.
5. Berkelanjutan, yaitu data disusun dengan prinsip pemutakhiran berkala agar Profil Kampung selalu mencerminkan kondisi aktual.

## **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Kampung Hiripau meliputi:

1. Data administrasi kampung, antara lain data kependudukan, kelembagaan kampung, sarana dan prasarana, serta dokumen perencanaan dan laporan kampung.
2. Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dari:
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
  - b. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)
  - c. Data statistik wilayah Kabupaten Mimika dan Distrik Mimika Timur.
3. Observasi lapangan dan wawancara narasumber kunci, yang digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi, lingkungan serta potensi dan permasalahan kampung yang belum sepenuhnya tercakup dalam data administratif.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

## 1. Data sekunder

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Hiripau dilaksanakan dengan memanfaatkan data sekunder resmi yang telah tersedia dan terpublikasi resmi, khususnya untuk kebutuhan data dasar kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui pemanfaatan Data Agregat Kependudukan Semester- I Tahun 2025 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika. Data tersebut digunakan untuk menghimpun informasi mengenai jumlah dan struktur penduduk, karakteristik sosial dasar, tingkat pendidikan, serta indikator kependudukan lainnya yang relevan dengan kebutuhan penyusunan profil kampung.

Pemanfaatan data sekunder resmi ini dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan dan belum optimalnya validitas data hasil pendataan langsung di lapangan. Untuk itu penggunaan data agregat Dukcapil dipandang sebagai sumber data yang paling andal, terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dalam mendukung penyusunan Profil Kampung Hiripau.

## 2. Data primer

- a. Wawancara Mendalam, yang ditujukan kepada informan kunci seperti aparat kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan unsur pemerintah kampung dan perwakilan masyarakat untuk menggali informasi kualitatif, mengidentifikasi isu strategis, serta merumuskan potensi dan kebutuhan prioritas kampung.

Setelah pengumpulan data sekunder dan primer, dilakukan verifikasi silang data sebagai proses pencocokan dan pengecekan data antar sumber, baik antara data lapangan dan data administratif maupun antar OPD, guna memastikan konsistensi dan keandalan data.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar menghasilkan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai kondisi Kampung Hiripau.

Data kuantitatif dianalisis melalui tabulasi dan pengelompokan indikator pembangunan sehingga dapat menggambarkan distribusi, kecenderungan, dan proporsi setiap variabel secara terukur. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, dan penafsiran untuk menangkap makna, dinamika sosial, serta konteks lokal yang melatarbelakangi data numerik.

#### **F. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan**

Penyusunan Profil Kampung Hiripau dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2025, meliputi tahapan persiapan, pengumpulan data lapangan dan validasi, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan dokumen profil kampung.

Wilayah cakupan penyusunan meliputi wilayah Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, termasuk kawasan permukiman, wilayah pesisir, serta area aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kampung.

136°47'0"E

136°48'0"E

4°41'0"S

4°41'0"S

4°42'0"S

4°42'0"S

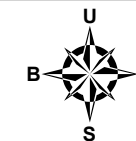
136°47'0"E

136°48'0"E



INSTITUT PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAPUA

**PETA TITIK LOKASI  
KAMPUNG HIRIAPU  
DISTRIK MIMIKA TIMUR  
KABUPATEN MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH**



Skala 1:16.000



Keterangan :

**X : 136° 47' 11,270" E**

**Y : 4° 41' 25,789" S**

● Titik Kampung

● Titik Kampung Lain

■ Kantor Distrik

Datum : WGS 1984

Proyeksi : UTM Zona 54 S

Sistem Kordinat : Geografis dan UTM

Sumber : Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)

Inset Peta



□ Lokasi Pemetaan

### BAGIAN III. PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG

#### A. Keadaan Wilayah Kampung

##### 1. Sejarah

###### a. Asal-usul kampung Hiripau

Kaukaputarowau dan Mimowau adalah nenek moyang orang Hiripau yang hidup di muara sungai Wania. Manusia saat itu masih hidup berpindah-pindah (nomaden), hal ini pun terjadi pada penduduk awal orang Hiripau dari muara sungai Wania mereka berpindah ke kampung Pigapu dan setelah itu mereka berpindah ke beberapa tempat yang sumber makannya masih tersedia yaitu Tirimuru, Waniahiripau dan Aoraipiya. Orang Hiripau telah membentuk badan pengurus kampung sejak mereka tinggal di Aoraipiya. Pada tahun 1982 mereka pindah ke Hiripau karena pemerintah sudah membuka akses jalan.

Berdasarkan cerita kepala suka dan tua-tua adat nama Hiripau yang sesungguhnya adalah Waniahiripau. Dimana wilayah adat Waniahiripau ini adalah Hiripau, Mware, Pigapu dan Kaugapu. Waniahiripau terbentuk dari tiga suku kata yaitu *Wania* (sungai), *Hiri* (artinya bulu burung), *Pau* (artinya mengintip)

###### b. Struktur sosial awal

Masyarakat adat Hiripau menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan dan marga diturunkan melalui garis ayah atau laki-laki. Hal ini menentukan keanggotaan marga, hak waris, dan peran sosial. Salah satu marga terbesar adalah Mapeko. Marga ini dianggap menjadi kasta terbesar dan disebut juga sebagai kasta raja.

Informasi mengenai marga perintis tunggal atau utama dalam suku Hiripau tidak tersedia secara eksplisit. Namun dari cerita kepala suku bahwa nenek moyang orang Hiripau adalah Kaukaputarowau dan Mimowau.

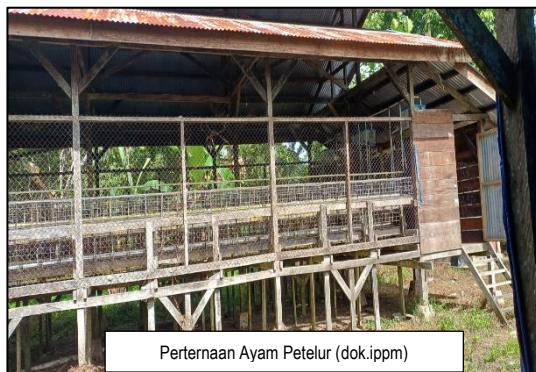
Pimpinan adat tertinggi untuk orang Hiripau adalah Kepala Suku. Semua yang berkaitan dengan adat istiadat, ritual adat, hak ulayat, cerita-cerita adat semua wewenang Kepala Suku.

Sistem permukiman sudah banyak perubahan. Banyak rumah permanen dibangun dengan bantuan pemerintah, TNI dan Freeport melalui Yayasan

Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro. Pembangunan rumah mengikuti alur jalan poros Timika-Mapurujaya juga mempengaruhi tata ruang kampung.

### c. Perkembangan kampung dari masa ke masa

Kampung Hiripau mengalami perkembangan dari masa ke masa, terutama dipengaruhi oleh masuknya pembangunan dan interaksi dengan dunia luar, dan masuknya suku-suku pendatang yang tinggal di Hiripau, seperti suku Bugis, Kei, Jawa. Perubahan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan fisik pemukiman. Ekonomi mulai terintegrasi dengan ekonomi pasar. Program-program



pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat dan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan pemuda

asli Hiripau oleh pemerintah kerja sama dengan PT Freeport adalah ternak ayam petelur dan pengadaan perahu motor jhonson oleh pemerintah daerah untuk masyarakat asli Hiripau. Perkembangan kampung Hiripau dari jaman kolonial sampe sekarang tidak lepas dari peran penting misionaris dan gereja, khususnya gereja Katolik. Tokoh agama menjadi sosok yang dijadikan panutan oleh masyarakat kampung Hiripau.

### d. Nilai dan kearifan lokal

Kampung Hiripau di Distrik Mimika Timur memiliki norma adat, ritual budaya, dan struktur kepemimpinan tradisional yang masih lestari. Salah satu ritual adat adalah Karapao. Karapao adalah upacara inisiasi penting untuk mengantarkan anak laki-laki memasuki kedewasaan, melatih mereka tentang adat leluhur, dan mempersiapkan menjadi pemangku adat, melibatkan penandai fisik dengan pakaian adat baru (*tauri*), dan seringkali membangun rumah adat Karapao dengan patung leluhur (*mbitoro*) sebagai simbol perlindungan dan kekuatan spiritual

Orang Hiripau mempunyai sistem sosial yang disebut Taparau yaitu membagi masyarakat ke dalam kelompok kekerabatan yang lebih besar dan mengatur

interaksi sosial serta perkawinan. Taparu ini terbagi atas dua yaitu *Purakupi* dan *Mayaripi*.

Norma adat sangat menekankan kepemilikan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam (hutan, sungai) secara komunal oleh masyarakat adat. Setiap agenda pembangunan di atas tanah ulayat harus seizin kepala suku atau masyarakat pemiliknya.

#### **e. Identitas kampung saat ini**

Salah satu tarian adat kampung Hiripau adalah tarian Ndi. Tarian Ndi yaitu tarian “goyang pantat” sebagai simbol pendewasaan anak-anak. Ritual Adat Karapao adalah upacara inisiasi penting untuk mengantar anak laki-laki memasuki kedewasaan, melatih mereka tentang adat leluhur, dan mempersiapkan menjadi pemangku adat, melibatkan penandai fisik dengan pakaian adat baru (*tauri*), dan seringkali membangun rumah adat Karapao dengan patung leluhur (*Mbitoro*) sebagai simbol perlindungan dan kekuatan spiritual. Tarian Tauri juga merupakan identitas diri kampung Hiripau.

### **2. Keadaan Wilayah**

#### **a. Letak geografis**

Batas wilayah administrasi : Utara berbatasan dengan Kampung Miyoko, Selatan berbatasan dengan Kampung Tipuka, Timur berbatasan dengan Kampung Hiripau, Barat berbatasan dengan Kampung Paumoko. Wilayah Waniahiripau berdasarkan hak ulayat meliputi Hiripau, Mware, Pigapu dan Hiripau.

Untuk batas berdasarkan hak ulayat, masyarakat Hiripau merasa bahwa ada hak ulayat mereka yang diklaim oleh kampung lain. Salah satunya adalah kampung Kaugapu. Menurut kepala suka Hiripau pada mulanya orang-orang Kaugapu diminta untuk menjaga tanah adat mereka. Namun seiring dengan perkembangan manusia, orang-orang yang tinggal di Kaugapu semakin banyak dan berkembang, mereka mengkalim bahwa tanah dimana mereka tinggal adalah tanah adat mereka.

#### **b. Luas wilayah dan pembagian zona**

Kondisi wilayah kampung Hiripau secara umum datar dengan luas  $\pm 180.000$  meter persegi ( $m^2$ ), setara dengan kurang lebih 18 hektar, dengan dimensi perkiraan panjang 600 meter dan lebar 300 meter, mencakup area perumahan, kantor, gereja, sekolah, dan jalan.

### c. Kondisi topografi dan geomorfologi

Kampung Hiripau terletak di dataran rendah yang didominasi oleh kondisi topografi datar hingga landai. Wilayah ini merupakan bagian dari ekosistem hutan hujan tropis dan daerah berawa.

Wilayah Hiripau berada sepanjang sungai Wania sehingga potensi untuk banjir pada musim hujan besar sekali. Jenis tanah di daerah ini kemungkinan besar didominasi oleh tanah aluvial atau gambut yang memiliki tekstur halus. Jenis tanah di daerah ini kemungkinan besar didominasi oleh tanah aluvial atau gambut yang memiliki tekstur halus.



Selokan dalam Kampung (dok.ippm)

### d. Iklim dan kondisi alam

Kampung Hiripau yang berada di Distrik Mimika Timur mengalami iklim hutan hujan tropis yang ditandai curah hujan tinggi sepanjang tahun dan suhu yang relatif konstan. Selain itu keadaan alam yang terdiri dari dataran rendah, sungai, dan hutan lebat, dengan karakteristik lingkungan permukiman di sepanjang sungai Wania yang merupakan salah satu sungai terbesar.



Sungai Wania (dok.ippm)

Curah hujan tinggi, terletak sepanjang sungai dan berada pada dataran rendah kerentanan terhadap banjir, terutama bagi rumah-rumah yang berada di pinggir kali atau sungai, yang terjadi hampir setiap tahun. Drainase di lingkungan permukiman juga belum memadai.

Lingkungan alamnya kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan lebat dengan flora dan fauna yang beragam. Masyarakat setempat menggunakan bahan alam seperti batang dan daun sagu atau pandan hutan untuk bahan bangunan rumah tradisional mereka. Kondisi iklim yang lembab dan sangat basah ini secara langsung mendukung keberadaan sumber daya alam yang menjadi ciri utama Kampung Hiripau. Hutan sagu tumbuh subur di wilayah rawa-rawa, menyediakan bahan pangan utama sekaligus penopang budaya masyarakat.

Sebagai kampung yang terletak sepanjang sungai Wania dan rawa rawa sumber daya alam utama di Kampung Hiripau, sangat terkait dengan sektor perikanan dan hasil hutan non-kayu, terutama sagu. Selain itu tingkat kesuburan tanah Hiripau sangat baik tentunya pengembangan sektor pertanian akan sangat mendapatkan hasil yang baik juga. Pohon pisang juga menjadi dominan, hampir setiap halaman baik depan maupun di belakang rumah terdapat pohon pisang.

## **B. Keadaan Perumahan**

### **1. Tipe dan Kondisi Bangunan Rumah**

Bangunan rumah di Kampung Hiripau umumnya bertipe permanen dengan dinding semen dan beratap seng. Rumah-rumah ini kebanyakan bantuan pemerintah, TNI dan PT. Freeport melalui Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Komoro (YPMK).

Perumahan di Kampung Hiripau pada umumnya tergolong layak huni dari sisi fisik bangunan. Namun demikian, hampir setiap rumah dihuni oleh empat hingga lima kepala keluarga, sehingga jumlah penghuni melebihi kapasitas ideal rumah. Kondisi kepadatan hunian ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, antara lain menurunnya kenyamanan, kesehatan lingkungan, serta kualitas kehidupan keluarga di dalam rumah tangga.



Jenis rumah permanen di Hiripau (dok.ippm)



### **2. Pola Permukiman**

Permukiman di Kampung Hiripau, memiliki pola linier atau memanjang yang berkembang mengikuti jalur jalan raya dan bantaran Sungai Wania. Hunian penduduk tersusun di kedua sisi jalan dengan orientasi pintu utama menghadap ke jalan, sementara pada beberapa rumah terdapat pintu belakang yang mengarah ke sungai dan dimanfaatkan sebagai akses perahu atau dermaga kecil. Pola ini mencerminkan

keterikatan masyarakat dengan aktivitas perairan, khususnya sebagai nelayan, serta pola hidup semi-nomaden yang masih kuat. Bahan bangunan yang digunakan umumnya non-permanen, seperti sagu yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan tradisi setempat.

Secara administrasi, Kampung Hiripau terbagi ke dalam lima Rukun Tetangga (RT), yaitu RT 01 hingga RT 05. Penyebaran penduduk pada masing-masing RT relatif seimbang, sehingga tidak terdapat perbedaan kepadatan yang mencolok antarwilayah dalam kampung tersebut.

### **3. Kepemilikan Rumah**

Kepemilikan rumah di Kampung Hiripau menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian rumah merupakan hasil bantuan pemerintah maupun YPMK, sementara sebagian lainnya merupakan rumah milik orang tua atau keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi ini mencerminkan adanya kombinasi antara dukungan program pembangunan perumahan dan pola kepemilikan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.

Secara umum, status kepemilikan rumah di Kampung Hiripau berkaitan erat dengan tanah adat, yang menjadi dasar utama penguasaan lahan. Dalam praktiknya, pelepasan hak atas tanah adat untuk kepemilikan individu dilakukan melalui pengakuan dan persetujuan tokoh adat serta kepala kampung, terutama ketika tanah tersebut akan disertifikatkan atas nama perorangan. Hal ini terlihat pada sejumlah kasus di mana tanah adat dilepas secara sah menjadi hak milik individu dengan dukungan penuh dari struktur adat dan pemerintahan kampung.

### **4. Luas Bangunan dan Jumlah Kamar**

Luas bangunan rumah penduduk di Kampung Hiripau rata-rata sekitar 42 meter persegi dengan ukuran bangunan 6 x 7 meter. Secara umum, rumah-rumah tersebut terdiri atas dua kamar tidur, satu ruang tamu dan satu ruang dapur, yang difungsikan untuk menunjang kebutuhan dasar keluarga.

Sementara itu, luasan halaman rumah sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh status dalam adat serta kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Dari sisi sanitasi, sebagian besar rumah penduduk telah dilengkapi dengan kamar mandi dan toilet, meskipun masih terdapat beberapa rumah yang belum memiliki fasilitas tersebut secara memadai.

## **5. Ketersediaan Fasilitas Dasar Rumah Tangga**

Ketersediaan fasilitas dasar rumah tangga di Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, secara umum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akses air bersih dan sanitasi yang layak. Sebagian rumah tangga telah menggunakan sumur sebagai sumber air, namun masih terdapat penduduk yang mengandalkan air Sungai Wania untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi air sungai yang berwarna kecoklatan dan keruh menunjukkan kualitas yang kurang layak. Hingga saat ini, layanan air PDAM belum tersedia, sehingga kondisi ini semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam rangka peningkatan layanan dasar masyarakat.

Keterbatasan akses air bersih tersebut berdampak langsung pada perilaku sanitasi masyarakat, di mana sebagian penduduk masih melakukan buang air besar di Sungai Wania. Praktik ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan. Di sisi lain dari aspek ketenagalistrikan, setiap rumah di Kampung Hiripau telah teraliri listrik PLN selama 24 jam, yang menjadi salah satu fasilitas dasar yang relatif sudah terpenuhi.

Selain itu, kondisi infrastruktur lingkungan permukiman masih memerlukan pembenahan. Sistem drainase rumah tangga belum tertata dengan baik, sehingga rawan terjadi genangan air dan banjir pada saat curah hujan tinggi. Setiap rumah juga belum dilengkapi tempat pembuangan sampah yang berpotensi menimbulkan permasalahan kebersihan lingkungan. Akses jalan menuju rumah-rumah penduduk masih berupa jalan tanah, sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama pada musim hujan.

## **C. Kependudukan**

### **1. Suku-suku di Kampung**

#### **a. Suku/marga asli**

Masyarakat Kampung Hiripau terdiri atas 75 marga yang tersebar di lima RT. Hubungan kekerabatan di kampung ini dikenal dengan sistem Tapura, yang menjadi dasar pengelompokan sosial dan relasi antar marga. Tapura terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu Purakupi dan Mayaripi, yang berfungsi sebagai kerangka pengikat solidaritas, kerjasama, serta pengaturan peran sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Selain itu, sistem kekerabatan masyarakat Hiripau menganut pola patrilineal, di mana garis keturunan, hak waris, dan kepemimpinan marga diturunkan melalui garis ayah. Dalam struktur sosial tersebut, marga Mapeko merupakan marga terbesar dan termasuk dalam marga dengan kasta tertinggi, sehingga memiliki posisi yang cukup berpengaruh dalam kehidupan adat dan pengambilan keputusan di Kampung Hiripau.

Tabel 3.1. Nama-nama Marga di Kampung Hiripau

| No | Marga          | No | Marga        | No | Marga      |
|----|----------------|----|--------------|----|------------|
| 1  | Ahuri          | 26 | Kitaro       | 51 | Omapokopa  |
| 2  | Ainiyu         | 27 | Korwa        | 52 | Omeyau     |
| 3  | Akarapea       | 28 | Kwamane      | 53 | Pakawa     |
| 4  | Amini          | 29 | Letsoin      | 54 | Papita     |
| 5  | Apako          | 30 | Mahera       | 55 | Papuraro   |
| 6  | Awor           | 31 | Mameyau      | 56 | Pawe       |
| 7  | Awor           | 32 | Manakopeyaru | 57 | Perahamame |
| 8  | Bame           | 33 | Manggaimu    | 58 | Piyai      |
| 9  | Bokeyau        | 34 | Maparo       | 59 | Rahawarin  |
| 10 | Edowai         | 35 | Mapeko       | 60 | Rumlus     |
| 11 | Eherepa        | 36 | Marteheyau   | 61 | Rumlus     |
| 12 | Emeyau         | 37 | Maupukareyau | 62 | Sakarpit   |
| 13 | Enakarapowae   | 38 | Mawiyuta     | 63 | Tamawiyuk  |
| 14 | Ikanubun       | 39 | Meraweyau    | 64 | Tenewa     |
| 15 | Ikonubun       | 40 | Mipitapo     | 65 | Tero       |
| 16 | Kaise          | 41 | Moperteyau   | 66 | Tiriyuka   |
| 17 | Kamisopa       | 42 | Murib        | 67 | Tonami     |
| 18 | Kaokapaitiparo | 43 | Nani         | 68 | Ukapoka    |
| 19 | Kaonapoka      | 44 | Napuruwau    | 69 | Wamuka     |
| 20 | Karunumu       | 45 | Nataimiri    | 70 | Wamuka     |
| 21 | Kasihiuw       | 46 | Natipia      | 71 | Warawarin  |
| 22 | Kauwau         | 47 | Nukowo       | 72 | Yakiyur    |
| 23 | Kawamane       | 48 | Nyan-Nyan    | 73 | Yataroko   |
| 24 | Kekoroko       | 49 | Okarnapoka   | 74 | Yatarowau  |
| 25 | Kemoyou        | 50 | Okware       | 75 | Omapokopa  |

Sumber: Data primer, 2025

#### b. Suku pendatang

Selain suku asli, Kampung Hiripau juga dihuni oleh beberapa suku pendatang, antara lain suku Bugis, suku Jawa dan suku Kei. Jumlah penduduk dari kelompok pendatang ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan suku asli

kampung Hiripau, namun keberadaan mereka telah menjadi bagian dari dinamika sosial kampung.

Meskipun secara jumlah tidak dominan, peran suku pendatang cukup signifikan dalam mendukung perkembangan Kampung Hiripau, khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keagamaan. Kehadiran mereka turut memperkaya praktik sosial, membuka akses pengetahuan baru, serta memperkuat interaksi lintas budaya dalam kehidupan masyarakat kampung.

### **c. Peran dan relasi sosial antar kelompok etnis**

Peran dan relasi sosial antar kelompok etnis di Kampung Hiripau menunjukkan pola hubungan yang saling mendukung dan bersifat timbal balik. Dalam bidang pemerintahan kampung, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, masing-masing kelompok etnis berkontribusi sesuai kapasitas dan perannya, tanpa sekat sosial yang mencolok.

Kondisi ini menciptakan kehidupan sosial yang relatif harmonis dan inklusif, ditandai dengan kuatnya nilai kebersamaan dan gotong royong. Berbagai kegiatan sosial, pembangunan, maupun penyelenggaraan acara kampung umumnya dilaksanakan secara kolektif, dengan keterlibatan lintas marga dan etnis, sehingga memperkuat kohesi sosial masyarakat.

## **2. Nilai dan Kearifan Lokal**

### **a. Norma adat dan sistem sosial**

Norma adat dan sistem sosial di Kampung Hiripau berlandaskan pada struktur kekerabatan yang kuat, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pola permukiman hingga pengelolaan sumber daya alam. Norma-norma adat tersebut menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan hubungan sosial dan keberlanjutan hidup bersama.

Dalam praktik sehari-hari, aturan adat berperan penting dalam penyelesaian konflik, pembagian lahan ulayat, serta pengambilan keputusan kolektif. Kedudukan kepala suku dan tokoh adat sangat menentukan, karena mereka memiliki otoritas adat untuk menengahi persoalan, menjaga hak ulayat, serta memastikan bahwa setiap keputusan tetap selaras dengan nilai dan hukum adat yang berlaku.

## **b. Ritual, tradisi, dan upacara**

Kampung Hiripau memiliki berbagai ritual dan tradisi adat khas yang masih dijaga hingga saat ini, salah satunya adalah ritual adat Karapao dan sistem kekerabatan Taparu. Ritual Karapao merupakan upacara inisiasi penting bagi anak laki-laki untuk memasuki fase kedewasaan, sekaligus sarana pewarisan nilai-nilai adat dan pengetahuan leluhur.

Ritual ini biasanya ditandai dengan penggunaan pakaian adat baru (tauri) serta pembangunan rumah adat Karapao yang dilengkapi patung leluhur (Mbitoro) sebagai simbol perlindungan dan kekuatan spiritual. Selain itu, tarian Tauri juga menjadi bagian penting dari identitas budaya Kampung Hiripau dan sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat dan sosial.

## **c. Pengetahuan lokal**

Pengetahuan lokal masyarakat Kampung Hiripau berakar kuat pada hubungan harmonis dengan lingkungan alam serta sistem sosial adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem kekerabatan Tapura berfungsi mengatur hubungan sosial, perkawinan, pembagian peran, dan tanggung jawab antar anggota masyarakat.

Kearifan lokal juga tercermin dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan, sungai, sagu, perikanan, dan kebun. Melalui pengetahuan adat tersebut, masyarakat memiliki cara-cara tradisional untuk menjaga keseimbangan alam serta mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor, sehingga lingkungan tetap lestari dan produktif.

## **d. Nilai-nilai dasar masyarakat**

Penduduk Kampung Hiripau meyakini dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang berakar kuat pada kearifan lokal dan tradisi adat. Nilai kerja sama, solidaritas, gotong royong, serta kebersamaan antar marga terus dipelihara dan menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam pelaksanaan kegiatan sosial dan adat.

Dalam tatanan adat, ritual adat dan sejarah kampung merupakan kewenangan kepala suku atau tua adat dan tidak dapat dibicarakan secara sembarangan. Penyampaian informasi terkait adat dan sejarah hanya dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan turun-temurun, karena

diyakini bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat menimbulkan dampak adat dan sosial tertentu.

Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Hiripau adalah bahasa Hiripau. Hingga saat ini, bahasa tersebut masih digunakan secara aktif dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat, sekaligus mencerminkan tingkat pelestarian bahasa lokal yang relatif masih terjaga.

### **3. Keadaan Penduduk**

#### **a. Jumlah penduduk**

Jumlah penduduk Kampung Hiripau hingga semester-1 tahun 2025 tercatat sebanyak 1.803 jiwa yang tersebar dalam 466 kepala keluarga pada lima RT. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kampung Hiripau merupakan komunitas dengan skala penduduk yang relatif berkembang, dengan sebaran yang tertata secara administratif sehingga memudahkan pengelolaan pemerintahan kampung serta pelayanan kepada masyarakat.

Dari sisi komposisi jenis kelamin, penduduk Kampung Hiripau terdiri atas laki-laki 963 jiwa (53,41%) dan perempuan 840 jiwa (46,59%). Struktur penduduk ini menunjukkan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan komposisi penduduk tersebut menjadi potensi penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Kampung Hiripau, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun partisipasi masyarakat. Dengan struktur penduduk yang proporsional, peluang keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan kampung, pembangunan dan pelayanan sosial menjadi lebih terbuka.

Selain masyarakat asli, Kampung Hiripau juga dihuni masyarakat Papua dari kampung-kampung sekitar serta pendatang dari berbagai latar belakang etnis, antara lain suku Bugis, Kei dan sebagian kecil suku Jawa. Keberadaan kelompok pendatang ini menjadi bagian dari struktur sosial kampung dan berinteraksi secara aktif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui aktivitas di sektor ekonomi dan pelayanan, seperti berdagang usaha kios, bekerja sebagai ASN, serta mengelola usaha pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Keberagaman etnis tersebut memperkaya dinamika sosial Kampung Hiripau dan mendorong terbangunnya hubungan sosial yang relatif harmonis, ditandai dengan kerjasama, saling menghormati dan keterlibatan bersama dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan.

## b. Struktur umur penduduk

Struktur umur penduduk memberikan gambaran tentang potensi demografi yang dapat dimaksimalkan melalui perencanaan pembangunan yang responsif usia, terutama dalam penyediaan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kapasitas ekonomi. Distribusi penduduk Kampung Hiripau menurut umur pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Distribusi Penduduk Kampung Hiripau menurut Umur Tahun 2025

| No. | Interval Umur (Tahun) | Jumlah | Presentase |
|-----|-----------------------|--------|------------|
| 1.  | 0 - 4                 | 149    | 8,26       |
| 2.  | 5 - 9                 | 196    | 10,87      |
| 3.  | 10 - 14               | 217    | 12,04      |
| 4.  | 15 - 19               | 164    | 9,10       |
| 5.  | 20 - 24               | 195    | 10,82      |
| 6.  | 25 - 29               | 169    | 9,37       |
| 7.  | 30 - 34               | 158    | 8,76       |
| 8.  | 35 - 39               | 120    | 6,66       |
| 9.  | 40 - 44               | 108    | 5,99       |
| 10. | 45 - 49               | 88     | 4,88       |
| 11. | 50 - 54               | 80     | 4,44       |
| 12. | 55 - 59               | 54     | 3,00       |
| 13. | 60 - 64               | 43     | 2,38       |
| 14. | 65 - 69               | 34     | 1,89       |
| 15. | 70 - 74               | 11     | 0,61       |
| 16. | 75+                   | 17     | 0,94       |
|     | Total                 | 1.803  | 100,00     |

Sumber: Data DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Distribusi penduduk kampung Hiripau berdasarkan Rasio beban tanggungan (*Dependency Ratio*) yaitu sebesar:

$$\frac{562 + 105}{1.136} \times 100 = 58,71 \text{ dibulatkan menjadi } 59$$

Sesuai dengan angka tersebut di atas, berarti DR di kampung Hiripau sebesar 59, dimana setiap 100 orang produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 59 orang yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan  $\geq 64$  tahun). Tingginya angka rasio beban tanggungan ini merupakan factor penghambat pembangunan ekonomi di kampung Hiripau, karena sebagian pendapatan yang diperoleh kelompok yang

produktif terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum atau tidak produktif.

Namun fakta menarik lain bahwa berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) Dinas Dukcapil Mimika Tahun 2025 jumlah penduduk kampung Hiripau yang telah terekam administrasi kependudukan e-KTP 82,30%, KTA 98,36%, KK 98,71% dan Akta Kelahiran 98,36%. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kampung Hiripau telah tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga berpeluang mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai program perlindungan pemerintah.

Namun masih adanya penduduk yang belum tercakup dalam perekaman administrasi kependudukan mengindikasikan adanya kendala mobilitas, tingkat kesadaran, atau keterbatasan akses terhadap layanan perekaman di kampung. Untuk itu diperlukan strategi yang lebih proaktif, kolaboratif dan sensitif konteks lokal agar seluruh penduduk dapat tercatat secara sah sebagai bagian dari sistem kependudukan negara.

### **c. Tingkat pendidikan**

Tingkat pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat stabilitas sosial dan politik, menciptakan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu wilayah, semakin besar peluang wilayah tersebut untuk berkembang secara cepat dan berkelanjutan.

Fakta data menunjukkan bahwa walaupun kampung Hiripau merupakan kampung dengan akses mudah, namun sebagian besar penduduk kampung saat ini belum menikmati akses pendidikan yang memadai. Data mencatat 42,93% penduduk tidak bersekolah, belum tamat SD 16,75%, tamat SD 11,92%, SMP 10,82% dan SMA 15,64% lebih rendah dari PT 1,95%. Komposisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk (82,41%) masih berada pada tingkat pendidikan dasar atau bahkan tidak berpendidikan, sehingga kapasitas literasi dan keterampilan dasar masyarakat masih sangat terbatas.

Distribusi penduduk Kampung menurut tingkat pendidikan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Hiripau menurut  
Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

| No. | Tingkat Pendidikan  | Jenis Kelamin |     | Jumlah | Persentase |
|-----|---------------------|---------------|-----|--------|------------|
|     |                     | L             | P   |        |            |
| 1.  | Tidak/belum sekolah | 410           | 364 | 774    | 42,93      |
| 2.  | Belum Tamat SD      | 162           | 140 | 302    | 16,75      |
| 3.  | Tamat SD            | 93            | 122 | 215    | 11,92      |
| 4.  | SLTP                | 105           | 90  | 195    | 10,82      |
| 5.  | SLTA                | 177           | 105 | 282    | 15,64      |
| 6.  | Diploma I/II        | 3             | 2   | 5      | 0,28       |
| 7.  | Akademi/D-III       | 4             | 10  | 14     | 0,78       |
| 8.  | D-IV/S-1            | 9             | 7   | 16     | 0,89       |
|     | Jumlah              | 963           | 840 | 1.803  | 100,00     |

Sumber: Data DKB Dukcapil Semester-1, 2025

#### **d. Mata pencaharian/pekerjaan**

Mata pencaharian merupakan kegiatan utama yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Konsep ini juga menggambarkan struktur ekonomi masyarakat, tingkat kemandirian, kemampuan memanfaatkan sumber daya lokal, serta sejauh mana suatu komunitas memiliki akses terhadap kesempatan kerja formal maupun informal.

Distribusi penduduk Kampung Hiripau menurut matapencaharian pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kampung Hiripau menurut  
Matapencaharian Tahun 2025**

| No. | Matapencaharian           | Jumlah | Persentase |
|-----|---------------------------|--------|------------|
| 1.  | Tidak berkerja            | 924    | 51,25      |
| 2.  | Ibu rumah tangga          | 278    | 15,42      |
| 3.  | Pelajar/Mahasiswa         | 239    | 13,26      |
| 4.  | Aparat Sipil Negara (ASN) | 66     | 3,66       |
| 5.  | Pedagang                  | 188    | 10,43      |
| 6.  | Petani tradisional        | 68     | 3,77       |
| 7.  | Nelayan                   | 27     | 1,50       |
| 8.  | Tenaga Kesehatan          | 5      | 0,28       |
| 9.  | Pensiunan                 | 5      | 0,28       |
| 10. | Tenaga Pengajar           | 3      | 0,17       |
|     | Jumlah                    | 1.803  | 100        |

Sumber: Data DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Berdasarkan data mata pencaharian penduduk Kampung Hiripau, terlihat bahwa sebagian besar penduduk (51,25) belum atau tidak bekerja yang menunjukkan masih terbatasnya kesempatan kerja produktif serta tingginya ketergantungan ekonomi dalam rumah tangga. Kelompok ibu rumah tangga juga cukup besar (15,42%), diikuti pelajar/mahasiswa (13,26%) yang mencerminkan struktur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia tidak produktif dan usia sekolah.

Sementara itu, penduduk yang bekerja di sektor formal relatif kecil, seperti Aparatur Sipil Negara (3,66%), tenaga kesehatan (0,28%), dan tenaga pengajar (0,17%), yang mengindikasikan keterbatasan sumber daya manusia pada sektor layanan publik dasar. Pada sektor ekonomi rakyat, (10,43%) menjadi kelompok terbesar, diikuti oleh petani tradisional (3,77%) dan nelayan (1,50%) yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih didominasi oleh usaha kecil dan mata pencaharian tradisional.

Secara keseluruhan, struktur mata pencaharian ini menggambarkan bahwa perekonomian Kampung Hiripau masih berada pada tahap ekonomi subsisten dan informal, dengan rendahnya proporsi tenaga kerja pada sektor formal dan profesional. Kondisi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang terarah, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja lokal, penguatan keterampilan dan pendidikan vokasional, pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat, serta pengembangan sektor pertanian dan perikanan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penduduk

#### **e. Status sosial ekonomi**

Masyarakat Kampung Hiripau sebagian besar tergolong dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini umumnya ditandai oleh pendapatan yang relatif rendah, mata pencaharian yang banyak berasal dari sektor informal, serta tingkat pendidikan yang masih terbatas, sehingga peluang untuk meningkatkan mobilitas sosial menjadi relatif kecil.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat cenderung tinggal di hunian sederhana dengan akses terhadap layanan dasar yang belum optimal, sementara pola konsumsi lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer. Keterbatasan tabungan dan kerentanan ekonomi menyebabkan kelompok ini mudah terdampak

oleh kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, maupun kondisi darurat, sehingga membutuhkan dukungan program pemberdayaan ekonomi dan penguatan layanan publik yang berkelanjutan.

#### f. Agama dan lembaga keagamaan

Komposisi agama yang dianut penduduk kampung yaitu Katolik, Kristen, dan Islam. Distribusi penduduk Kampung Hiripau menurut agama pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Distribusi Penduduk Kampung Hiripau menurut Agama Tahun 2025

| No. | Agama     | Jumlah | Persentase |
|-----|-----------|--------|------------|
| 1.  | Katolik   | 1278   | 70,88      |
| 2.  | Protestan | 88     | 4,88       |
| 3.  | Islam     | 437    | 24,24      |
| 4.  | Hindu     | 0      | 0          |
| 5.  | Budha     | 0      | 0          |
|     | Jumlah    | 1.803  | 100        |

Sumber: Data DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Berdasarkan data komposisi agama penduduk Kampung Hiripau, terlihat bahwa agama Katolik merupakan agama mayoritas (70,88%) dari total penduduk. Dominasi pemeluk Katolik ini menunjukkan kuatnya pengaruh gereja dan institusi keagamaan Katolik dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan, kegiatan sosial, serta pembinaan moral di tingkat kampung.

Selain itu, terdapat pemeluk agama Islam (24,24%) dan penduduk pemeluk Protestan (4,88%). Meskipun terdapat perbedaan latar belakang agama, komposisi ini mencerminkan keberagaman keyakinan yang cukup signifikan di Kampung Hiripau. Tidak terdapat penduduk yang menganut agama Hindu dan Budha. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya potensi kehidupan sosial yang plural dan toleran, yang dapat menjadi modal sosial penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat di Kampung Hiripau.

#### 4. Migrasi dan Mobilitas Penduduk

##### a. Migrasi masuk (*in-migration*)

Kampung Hiripau merupakan wilayah yang terbuka terhadap kehadiran penduduk dari luar kampung. Kedatangan penduduk tersebut umumnya bersifat

sementara maupun fungsional, seperti untuk mengunjungi keluarga, menumpang tinggal dalam jangka waktu tertentu, mencari pekerjaan, serta melaksanakan aktivitas kerja pada sektor-sektor layanan dasar, khususnya pendidikan (guru) dan kesehatan (tenaga medis). Selain itu, terdapat pula pendatang yang datang untuk berdagang maupun yang kemudian menjalin ikatan perkawinan dengan masyarakat setempat dan menetap sebagai bagian dari komunitas kampung.

Meskipun bersifat terbuka terhadap arus masuk penduduk, hingga saat ini kehadiran pendatang tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi Kampung Hiripau. Tataan sosial masyarakat adat tetap terjaga, nilai-nilai budaya lokal masih berfungsi dengan baik, serta hubungan sosial antarwarga berlangsung secara harmonis dan saling menghormati. Dalam aspek ekonomi, aktivitas masyarakat lokal tetap menjadi penopang utama kehidupan kampung, sementara peran pendatang lebih bersifat melengkapi.

Secara keseluruhan, dinamika mobilitas penduduk di Kampung Hiripau berlangsung secara terkendali, adaptif, dan inklusif. Tingkat penerimaan sosial yang baik menunjukkan kemampuan masyarakat kampung dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap pendatang dan pelestarian identitas sosial, budaya, serta ekonomi lokal, sehingga keberlanjutan kehidupan kampung tetap terjaga.

#### **b. Migrasi keluar (*out-migration*)**

Migrasi keluar (*out-migration*) dari Kampung Hiripau merupakan fenomena yang terjadi secara terbatas dan bersifat selektif. Sebagian penduduk kampung merantau ke kota atau daerah lain dengan tujuan yang beragam. Terdapat penduduk yang menetap di luar kampung dalam jangka panjang, namun ada pula yang kembali ke Kampung Hiripau setelah menyelesaikan aktivitasnya di luar daerah. Secara umum, tujuan utama migrasi keluar meliputi melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi, bekerja dan berdagang, pelayanan keagamaan, serta perkawinan dengan penduduk dari luar kampung dalam kabupaten Mimika maupun luar kabupaten ini.

Migrasi keluar tersebut membawa sejumlah dampak bagi kehidupan kampung. Di satu sisi, terdapat manfaat berupa pengiriman uang (*remitan*) kepada keluarga di kampung yang turut membantu perekonomian rumah tangga. Namun di

sisi lain, migrasi juga berpotensi menimbulkan berkurangnya tenaga kerja usia muda, penurunan jumlah penduduk asli, serta perubahan nilai dan pola budaya. Bagi penduduk yang kembali ke kampung, migrasi sering kali diikuti dengan perubahan pola pikir dan cara pandang, yang dapat mempengaruhi dinamika sosial dan aspirasi pembangunan di tingkat kampung.

#### **c. Mobilitas harian/berkala**

Selain migrasi keluar, Kampung Hiripau juga mengalami mobilitas harian dan berkala yang berlangsung secara rutin. Pergerakan penduduk keluar-masuk kampung terjadi setiap hari maupun secara musiman dengan menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor, serta kendaraan umum yang telah beroperasi secara teratur mulai pukul 06.00 hingga 19.00 WIT. Mobilitas ini mencerminkan keterhubungan Kampung Hiripau dengan wilayah perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi di sekitarnya.

Aktivitas ekonomi harian dan berkala masyarakat yang paling menonjol adalah membawa hasil kebun untuk dijual ke pasar di kota, mengingat belum tersedianya pasar permanen di Kampung Hiripau. Komoditas utama yang dipasarkan meliputi sagu, pisang, dan buah salak, serta berbagai hasil kebun lainnya seperti umbi-umbian, cabai, dan sayuran. Kegiatan ini menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antara kampung dan wilayah perkotaan.

#### **d. Dinamika perubahan komposisi penduduk**

Dalam konteks dinamika perubahan komposisi penduduk, mobilitas masuk dan keluar Kampung Hiripau relatif tidak menunjukkan fluktuasi yang berarti. Arus migrasi yang terjadi cenderung seimbang, sehingga tidak terdapat kecenderungan peningkatan maupun penurunan jumlah penduduk yang signifikan dari waktu ke waktu. Kondisi ini menjadikan jumlah penduduk Kampung Hiripau relatif stabil.

Kestabilan populasi tersebut tidak menimbulkan dampak yang berarti terhadap perencanaan dan penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hingga saat ini, kebutuhan layanan umum masih dapat direncanakan dan dikelola secara proporsional sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat kampung, tanpa tekanan tambahan akibat perubahan jumlah penduduk yang ekstrem.

## **D. Pendidikan**

### **1. Konsep Masyarakat tentang Pendidikan**

#### **a. Pandangan umum masyarakat**

Pendidikan dalam pandangan masyarakat Kampung Hiripau, khususnya para orang tua, dipahami sebagai aspek yang sangat penting bagi masa depan anak-anak. Kesadaran ini tercermin dari upaya orang tua yang secara konsisten memberikan dorongan, nasehat, dan motivasi kepada anak-anak mereka agar rajin bersekolah dan menempuh pendidikan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat Kampung Hiripau, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kualitas hidup generasi penerus.

Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai tantangan di lapangan. Beberapa orang tua menuturkan bahwa sebagian anak menunjukkan tingkat kedisiplinan yang rendah dalam mengikuti kegiatan sekolah, termasuk enggan untuk berangkat ke sekolah. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh situasi lingkungan kampung yang telah terdampak oleh peredaran dan konsumsi minuman keras (miras), sehingga memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku dan motivasi belajar anak-anak. Faktor lingkungan sosial tersebut menjadi salah satu hambatan yang dirasakan dalam upaya menumbuhkan budaya belajar yang kuat di kalangan generasi muda.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, harapan masyarakat terhadap anak-anak yang sedang menempuh pendidikan tetap sangat besar. Orang tua berharap agar anak-anak dapat terus bersekolah dan tidak putus di tengah jalan, sehingga kelak mampu membantu orang tua serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendidikan dipahami sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik, di mana anak-anak diharapkan dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan bermartabat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Hiripau menempatkan pendidikan sebagai sarana utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi kampung secara berkelanjutan.

#### **b. Peran keluarga dalam pendidikan anak**

Peran orang tua dalam memastikan kehadiran anak di sekolah sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak. Di Kampung Hiripau, kolaborasi antara

guru dan orang tua telah berlangsung dan pada umumnya orang tua menunjukkan kepedulian dengan mengingatkan anak-anak untuk belajar di rumah. Namun demikian, kualitas pendampingan belajar yang diberikan orang tua sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua yang relatif masih rendah, sehingga dukungan yang diberikan lebih bersifat moral dan pengawasan dasar, belum sampai pada pendampingan akademik yang memadai.

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berimplikasi pada pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya pendidikan jangka panjang bagi masa depan anak. Kondisi ini menyebabkan sebagian orang tua memandang keterlibatan anak dalam aktivitas kerja sebagai hal yang wajar, terutama untuk membantu ekonomi keluarga. Akibatnya, terdapat anak-anak yang dibiarkan bekerja sebagai buruh pelabuhan, meskipun masih berada pada usia sekolah.

Praktik tersebut berdampak negatif terhadap keberlanjutan pendidikan, karena anak berisiko mengalami penurunan kehadiran di sekolah, kelelahan fisik, serta tekanan psikologis yang dapat menghambat perkembangan kognitif dan emosional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan anak di Kampung Hiripau tidak hanya membutuhkan penguatan peran sekolah, tetapi juga intervensi peningkatan literasi orang tua, penguatan kesadaran akan hak anak atas pendidikan, serta dukungan sosial-ekonomi bagi keluarga dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah.

### **c. Nilai-nilai lokal tentang pendidikan**

Belum ditemukan adanya nilai-nilai maupun kearifan adat Hiripau yang secara langsung menghambat penyelenggaraan pendidikan formal. Secara normatif, masyarakat adat tidak menolak sekolah dan pada prinsipnya menerima pendidikan sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan masa depan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utama pendidikan di Kampung Hiripau bukan berasal dari faktor budaya atau adat, melainkan dari faktor sosial, ekonomi, dan struktural.

Namun demikian, pandangan dan orientasi generasi muda terhadap pendidikan belum menunjukkan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Hal ini tercermin dari rendahnya angka keberlanjutan pendidikan, di mana hampir tidak ada generasi muda yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi,

bahkan sebagian mengalami putus sekolah sejak jenjang SD, SMP, maupun SMA. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya motivasi pendidikan jangka panjang serta terbatasnya contoh keberhasilan pendidikan tinggi di lingkungan sekitar.

Selain itu, keterlibatan anak-anak dalam aktivitas kerja sebagai buruh pelabuhan sejak usia pendidikan dasar menjadi faktor penghambat utama keberlanjutan pendidikan. Keterlibatan tersebut tidak hanya mengurangi waktu belajar, tetapi juga membentuk orientasi pragmatis bahwa bekerja lebih cepat menghasilkan pendapatan dibanding melanjutkan sekolah. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas pendidikan lanjutan di Kampung Hiripau, khususnya belum tersedianya SMP dan SMA di wilayah kampung, sehingga anak-anak harus keluar kampung untuk melanjutkan pendidikan. Kombinasi faktor ekonomi, keterbatasan sarana pendidikan, dan rendahnya dukungan struktural inilah yang secara nyata mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan menengah dan tinggi di Kampung Hiripau.

#### **d. Isu dan tantangan sosial**

Fenomena sosial pernikahan dini masih ditemukan pada beberapa kasus di Kampung Hiripau dan menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Meskipun demikian, beban kerja anak relatif tidak terlalu berat, karena keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi umumnya bersifat membantu orang tua, seperti ikut bekerja di kebun pada saat hari libur sekolah. Pola ini masih dipandang sebagai bagian dari pembelajaran sosial dan kemandirian anak dalam konteks kehidupan keluarga.

Dari sisi akses pendidikan, jarak sekolah yang relatif dekat dan berada di dalam kampung tidak menjadi kendala bagi anak-anak untuk bersekolah, karena dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan pendidikan di Kampung Hiripau bukan disebabkan oleh faktor geografis, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, seperti pernikahan dini serta orientasi keluarga terhadap pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kesadaran orang tua dan remaja mengenai pentingnya pendidikan berkelanjutan, khususnya dalam menunda usia perkawinan dan mendorong anak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah dan tinggi.

## 2. Kelembagaan Pendidikan

### a. Jenis Lembaga dan status sekolah

Hanya ada satu sekolah yaitu SD St. Aloysius Hiripau YPPK Tillemans. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1929 oleh misionaris Katolik bersama masyarakat perutusan suku Kei. Walaupun sekolah ini sudah berdiri lama namun perhatian pemerintah dan pihak YPPK sangat kurang. Hal ini terlihat dari sarana prasarana yang masih kurang. Siswa sekolah tidak dipungut biaya atau dengan kata lain gratis dan hampir semua siswa putra asli kampung Hiripau dan ada beberapa saja yang berasal dari kampung sekitarnya.



### b. Fasilitas sekolah

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kampung Hiripau masih belum sepenuhnya memadai. Saat ini terdapat dua gedung sekolah, di mana satu gedung berada dalam kondisi layak, sementara satu gedung lainnya dalam kondisi tidak layak dan masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Secara keseluruhan tersedia enam ruang kelas, satu ruang guru, dan satu ruang kepala sekolah. Fasilitas sanitasi terdiri atas empat toilet siswa dan dua toilet guru, namun hingga kini belum tersedia sumber air bersih yang permanen, sehingga pemanfaatan toilet dan kebersihan lingkungan sekolah belum optimal.

Dalam praktik pembelajaran, kelas 1 dan kelas 2 masih menggunakan ruang belajar di gedung lama yang tidak layak, sedangkan kelas 3 hingga kelas 4 menempati ruang kelas di gedung baru yang relatif lebih baik. Kondisi ruang guru juga belum memenuhi standar kelayakan, sehingga kurang mendukung kenyamanan dan kinerja tenaga pendidik. Selain itu sekolah belum memiliki ruang perpustakaan dan laboratorium, yang berdampak pada terbatasnya akses siswa terhadap bahan bacaan dan pembelajaran berbasis praktik. Kondisi ini berpotensi

mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar serta motivasi belajar siswa, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi serius dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kampung Hiripau.

#### **c. Aksesibilitas sekolah**

Anak-anak yang bersekolah di SD YPPK St. Aloisius pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari Kampung Hiripau dan kampung sekitarnya yang berlokasi relatif dekat dengan sekolah. Jarak tempuh siswa menuju sekolah berkisar hingga  $\pm 3$  km, sehingga sebagian besar siswa berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Akses menuju sekolah melewati jalan raya poros yang menghubungkan Kota Timika dengan kawasan pelabuhan, dengan kondisi jalan yang relatif rata dan tidak menjadi kendala berarti bagi mobilitas siswa.

Meskipun kondisi fisik jalan cukup mendukung, perjalanan menuju sekolah tetap memiliki risiko keselamatan, terutama akibat lalu lintas kendaraan bermotor yang melintas di jalur poros tersebut. Potensi bahaya tertabrak kendaraan menjadi ancaman nyata apabila anak-anak tidak berhati-hati atau tidak mendapat pendampingan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya perlindungan keselamatan siswa, seperti edukasi keselamatan berlalu lintas, penyediaan rambu penyeberangan, pengaturan kecepatan kendaraan di sekitar sekolah, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

#### **e. Manajemen dan tata kelola**

Manajemen sekolah berkaitan tentang mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan dan fokus pada peningkatan mutu pendidikan, kompetensi guru, motivasi siswa, dan lingkungan belajar yang kondusif. Sedangkan tata kelola kelas terkait dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik di sekolah, memastikan semua program dan kebijakan terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan banyak pihak, dan berdampak positif pada mutu.

Komite sekolah salah satu bagian penting dalam aktivitas belajar mengajar di sekolah yang bertugas memberi pertimbangan, mendukung dana, tenaga, pemikiran, mengontrol, dan menjadi mediator antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan

masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, meliputi penyusunan kebijakan, penggalangan dana, evaluasi program, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan sekolah dan karakter siswa.

Tokoh adat dan agama berperan penting untuk memastikan aktivitas belajar mengajar di sekolah berjalan aman dan lancar. Tokoh agama membimbing moralitas dan spiritualitas sesuai ajaran agama, sementara tokoh adat menjaga kearifan lokal dan keharmonisan sosial, sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang berakhlak mulia dan berbudaya.

### **3. Keadaan Guru dan Murid**

#### **a. Jumlah guru**

Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan di SD YPPK St. Aloisius masih sangat terbatas. Saat ini sekolah hanya memiliki 1 guru PNS, 1 guru tetap yayasan (YPPK) yang sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah, serta 3 orang guru honorer. Dengan komposisi tersebut, jumlah guru masih belum memenuhi standar kebutuhan ideal untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Selain itu, sekolah ini belum memiliki guru bidang studi dan guru agama, yang berdampak pada keterbatasan layanan pembelajaran sesuai kurikulum.

Di sisi lain, SD St. Aloisius juga belum memiliki pegawai tata usaha dan operator sekolah. Selama ini, seluruh tugas administrasi dan pengelolaan data sekolah dijalankan langsung oleh kepala sekolah. Kondisi ini menyebabkan beban kerja kepala sekolah menjadi sangat berat dan berpotensi mengurangi fokus pada fungsi manajerial dan pembinaan akademik. Akibatnya, proses belajar mengajar dan pengelolaan sekolah tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga diperlukan perhatian dan intervensi serius baik dari pihak YPPK maupun pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, terutama dalam pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah tersebut.

#### **b. Kualifikasi dan kompetensi**

Guru dengan kualifikasi D2 ada 2 orang, S1 3 orang. Dua orang yang dengan kualifikasi D2 saat ini sedang menyelesaikan pendidikan strata satu (S1). Belum ada guru yang mendapat sertifikat pendidik. Berdasarkan kualifikasi dan kompetensi guru-guru yang ada saat ini maka SD St. Aloisius ini belum memenuhi standar minimal. Guru-guru yang kualifikasinya belum sesuai untuk didorong dan

difasilitasi untuk segera menyelesaikan pendidikan strata satunya (S1), dan untuk guru-guru yang belum memiliki sertifikat pendidik agar diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).

#### **c. Kehadiran guru**

Tingkat kehadiran guru di SD YPPK St. Aloisius tergolong baik, dengan rata-rata kehadiran di atas 80 persen, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara relatif lancar. Kondisi ini tidak terlepas dari peran kepala sekolah yang menerapkan disiplin kerja yang tinggi bagi para guru, sehingga tercipta budaya kerja yang bertanggung jawab dan konsisten dalam pelaksanaan tugas pembelajaran.

Namun demikian, sekolah belum menyediakan fasilitas perumahan bagi guru, sehingga para guru harus mencari tempat tinggal secara mandiri. Kepala sekolah dan satu orang guru memilih tinggal di Kampung Hiripau yang berdekatan dengan lokasi sekolah, sementara beberapa guru lainnya menetap di Kota Timika dan harus menempuh perjalanan menggunakan transportasi umum untuk datang ke sekolah. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi keberlanjutan kehadiran guru dalam jangka panjang, terutama apabila terjadi kendala transportasi, sehingga diperlukan perhatian terkait penyediaan hunian guru atau dukungan transportasi guna menjaga stabilitas dan kualitas layanan pendidikan.

### **4. Partisipasi Siswa dalam Proses Belajar-Mengajar**

#### **a. Kehadiran dan keaktifan siswa**

Tingkat kehadiran siswa di sekolah secara umum berada di atas 75 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih mengikuti kegiatan pembelajaran secara rutin. Namun demikian terdapat beberapa siswa dengan tingkat kehadiran yang rendah karena terlibat sebagai buruh kapal atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ketika kapal sandar di pelabuhan. Keterlibatan ini terjadi bahkan pada jam belajar efektif, sehingga mengganggu konsistensi kehadiran siswa di sekolah.

Pengaruh orang tua sangat menentukan terhadap tingkat kehadiran dan keaktifan siswa. Sebagian orang tua masih membiarkan anak-anaknya bekerja saat jam sekolah, yang berdampak negatif terhadap motivasi belajar dan komitmen siswa terhadap pendidikan. Dari sisi pengembangan minat dan bakat, sekolah telah

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler seperti membaca, menulis, dan menghitung (3M), peraturan baris-berbaris (PBB), serta pramuka. Namun, keterbatasan jumlah guru menyebabkan pelaksanaan kegiatan tersebut belum berjalan optimal, dengan aktivitas sekolah yang umumnya berakhir pada pukul 13.00 WIT.

#### **b. Dukungan Keluarga**

Peran orang tua dan keluarga dalam mendukung proses pendidikan anak di Kampung Hiripau pada dasarnya cukup baik, terutama dalam hal pengawasan dan dorongan agar anak tetap bersekolah. Sebagian besar orang tua menyadari pentingnya pendidikan dan berupaya mengontrol aktivitas anak agar tetap mengikuti kegiatan belajar, baik di sekolah maupun di rumah.

Dari sisi pemenuhan sarana belajar, sekolah telah membantu dengan menyediakan buku pelajaran dan seragam sekolah, sehingga beban orang tua menjadi lebih ringan. Orang tua pada umumnya hanya perlu melengkapi kebutuhan lain seperti tas, sepatu sekolah, alat tulis dan perlengkapan pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kerja sama antara sekolah dan keluarga, meskipun masih diperlukan penguatan kesadaran orang tua agar tidak membiarkan anak terlibat dalam aktivitas kerja yang mengganggu pendidikan.

### **5. Pendidikan Nonformal**

#### **a. Jenis pendidikan nonformal dan penyelenggara**

Hingga saat ini, belum terdapat penyelenggara pendidikan nonformal di Kampung Hiripau, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Padahal, berdasarkan data dan informasi yang tersedia, terdapat anak-anak dan remaja yang mengalami putus sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.

Ketiadaan layanan pendidikan nonformal ini menyebabkan tidak adanya alternatif jalur pendidikan bagi anak-anak dan pemuda yang telah keluar dari sistem pendidikan formal. Oleh karena itu, kehadiran pendidikan nonformal, seperti program kejar paket, kursus keterampilan, atau pendidikan kesetaraan, menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mengembalikan akses pendidikan serta meningkatkan keterampilan dan peluang kerja generasi muda di Kampung Hiripau.

## **b. Tantangan pengembangan pendidikan nonformal**

Pengembangan pendidikan nonformal di Kampung Hiripau masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan instruktur yang kompeten, minimnya sarana dan prasarana belajar, serta akses internet yang belum memadai, sehingga baik pemerintah maupun pihak swasta belum siap menyelenggarakan program pendidikan nonformal secara optimal.

Selain itu tingkat antusiasme dan minat masyarakat terhadap pendidikan nonformal masih relatif rendah, yang dipengaruhi oleh orientasi pragmatis pada kerja jangka pendek serta rendahnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang pendidikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan sosialisasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar pendidikan nonformal dapat diterima dan dimanfaatkan sebagai jalur peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kampung Hiripau.

## **E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana**

### **1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit, dan Penyakit**

#### **a. Pemaknaan “sehat” menurut masyarakat**

Masyarakat Kampung Hiripau memaknai sehat sebagai kondisi di mana jasmani, psikologis, dan rohani berada dalam keadaan bugar dan seimbang. Sehat tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan penyakit, tetapi sebagai kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal, seperti bekerja di kebun, mencari ikan di sungai, serta melakukan berbagai kegiatan sosial yang bernilai positif.

Pemaknaan ini menunjukkan bahwa konsep kesehatan masyarakat Hiripau bersifat holistik, mencakup keseimbangan antara aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan kesehatan modern yang menekankan kesejahteraan menyeluruh, sehingga menjadi modal penting dalam pengembangan program kesehatan berbasis budaya lokal.

#### **b. Pemaknaan “Sakit”**

Penduduk Kampung Hiripau memaknai sakit dalam dua kategori utama. Pertama, sakit yang dipahami sebagai akibat faktor alami dan biologis, seperti

kuman, bakteri, virus, atau cedera fisik, yang diwujudkan dalam penyakit seperti demam, malaria, batuk, pilek dan luka.

Kedua, sakit juga dimaknai sebagai akibat kekuatan supranatural, seperti gangguan roh jahat, pelanggaran adat, sihir, atau kutukan dari pihak lain. Dualisme pemaknaan ini mencerminkan adanya koeksistensi antara pengetahuan medis modern dan kepercayaan tradisional yang mempengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons kondisi kesehatan.

#### **c. Penyebab penyakit menurut masyarakat**

Dalam kehidupan masyarakat di kampung Hiripau, penyakit yang bersifat medis seperti demam, malaria, batuk, pilek dan luka umumnya disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat, seperti penumpukan sampah di sekitar rumah, banyaknya genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, serta konsumsi makanan dan minuman yang kurang higienis. Pola hidup yang tidak sehat juga dipandang sebagai faktor pemicu utama penyakit tersebut.

Sementara itu penyakit yang diyakini berasal dari kekuatan supranatural dipandang sebagai akibat dari konflik sosial atau pelanggaran norma adat, seperti adanya rasa kebencian, sakit hati, atau pelanggaran adat tertentu. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa kesehatan tidak hanya dipahami sebagai persoalan biologis, tetapi juga berkaitan erat dengan harmoni sosial dan ketaatan terhadap nilai adat.

#### **d. Respons masyarakat ketika sakit**

Respons masyarakat Kampung Hiripau terhadap sakit sangat bergantung pada jenis penyakit yang dialami. Untuk penyakit yang dianggap bersifat medis, seperti demam, batuk, pilek atau malaria, masyarakat cenderung segera mencari layanan kesehatan, seperti kader kesehatan, untuk pemeriksaan dan pengobatan medis. Dalam beberapa kasus, obat-obatan tradisional juga digunakan sebagai pelengkap pengobatan.

Sebaliknya ketika sakit diyakini berasal dari kekuatan supranatural, masyarakat lebih memilih mencari bantuan tokoh adat, dukun atau paranormal. Proses diagnosis dan penyembuhan sering melibatkan ritual adat, seperti pengisapan darah, pengurutan, atau penggunaan jimat. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan tradisional masih memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penanganan penyakit yang dimaknai secara spiritual.

### **e. Peran tokoh adat dan agama dalam kesehatan**

Tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen sosialisasi kesehatan sekaligus jembatan antara sistem kesehatan modern dan nilai budaya lokal. Pengaruh mereka yang kuat terhadap pola pikir dan pengambilan keputusan masyarakat menjadikan mereka figur yang dipercaya dan dihormati dalam urusan kesehatan.

Peran tersebut menjadikan tokoh adat dan agama sebagai mitra penting dalam pelaksanaan program kesehatan, terutama dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan medis, perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pencegahan penyakit. Dengan melibatkan tokoh adat dan agama, program kesehatan dapat disampaikan secara lebih kontekstual, efektif dan berkelanjutan.

## **2. Kesehatan**

### **a. Jenis dan ketersediaan fasilitas kesehatan**

Kampung Hiripau hingga saat ini belum memiliki fasilitas kesehatan permanen seperti puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), poskesdes, polindes, posyandu tetap, maupun rumah singgah. Ketika masyarakat mengalami sakit, pertolongan pertama umumnya dilakukan melalui kader kesehatan kampung, yang memberikan pelayanan awal seperti pemeriksaan sederhana, termasuk pemeriksaan darah (misalnya untuk malaria). Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dibawa atau dilaporkan ke Puskesmas Mapurujaya untuk mendapatkan obat dan tindak lanjut pengobatan.

Dalam praktiknya, meskipun tidak terdapat fasilitas kesehatan di dalam kampung, pelayanan kesehatan dasar tetap berlangsung melalui jangkauan wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya. Petugas puskesmas secara berkala melakukan kunjungan langsung (*door-to-door*) ke Kampung Hiripau untuk pelayanan imunisasi, pemeriksaan malaria, dan pemeriksaan kesehatan umum. Pola pelayanan ini menunjukkan bahwa akses kesehatan masyarakat Hiripau sangat bergantung pada sistem layanan bergerak dan rujukan distrik, bukan pada fasilitas kampung itu sendiri.

### **b. Tenaga kesehatan yang tersedia**

Tenaga kesehatan yang menetap di Kampung Hiripau hanya terdiri atas kader kesehatan dan kader posyandu. Dari sisi kompetensi, peran kader bersifat terbatas

karena tidak memiliki kewenangan dan keahlian medis yang memadai untuk melakukan diagnosis dan penanganan penyakit secara komprehensif. Akibatnya, pelayanan kesehatan di tingkat kampung belum dapat berjalan optimal dan sangat bergantung pada kunjungan tenaga kesehatan dari luar kampung.

Kehadiran tenaga medis profesional dan dokter di Kampung Hiripau masih sangat jarang dan bersifat insidental. Penanganan kasus kesehatan sering kali mengalami keterlambatan akibat keterbatasan transportasi, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta ketersediaan obat yang terbatas di tingkat kampung. Situasi ini memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap Puskesmas Mapurujaya sebagai pusat pelayanan utama dan rujukan kesehatan.

#### **c. Jenis penyakit yang umum terjadi**

Jenis penyakit yang paling sering dikeluhkan masyarakat Kampung Hiripau antara lain malaria, batuk pilek, penyakit kulit, serta gangguan pencernaan. Masyarakat meyakini bahwa penyakit-penyakit tersebut umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti banyaknya genangan air, sanitasi yang kurang memadai, serta perubahan cuaca.

Dalam penanganan awal, sebagian masyarakat masih memanfaatkan obat-obatan tradisional. Namun demikian, apabila kondisi tidak membaik, masyarakat pada umumnya tetap mencari layanan kesehatan modern, baik melalui kader kesehatan maupun langsung ke Puskesmas Mapurujaya. Hal ini menunjukkan adanya kombinasi antara praktik pengobatan tradisional dan modern dalam sistem kesehatan masyarakat Kampung Hiripau.

#### **d. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan**

Akses masyarakat Kampung Hiripau terhadap layanan kesehatan masih sangat terbatas, karena tidak adanya fasilitas kesehatan permanen di dalam wilayah kampung. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, masyarakat harus mengakses Puskesmas Mapurujaya atau fasilitas kesehatan lain di ibu kota distrik maupun di Kota Timika. Akses ini memerlukan waktu tempuh dan biaya transportasi tambahan, yang menjadi kendala serius bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Keterbatasan akses ini berdampak pada rendahnya frekuensi pemeriksaan kesehatan rutin, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, lansia dan kelompok rentan

lainnya. Banyak masyarakat cenderung menunda pemeriksaan kesehatan karena pertimbangan jarak dan biaya, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan penanganan, terutama pada kondisi darurat dan penyakit menular.

#### **e. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di Kampung Hiripau belum berjalan secara optimal. Kebiasaan sederhana seperti cuci tangan belum sepenuhnya dipraktikkan oleh seluruh masyarakat. Sebagian besar rumah tangga telah memiliki jamban, namun masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan, khususnya di sungai.

Kondisi ini erat kaitannya dengan keterbatasan akses air bersih, yang mempengaruhi perilaku sanitasi dan kebersihan lingkungan. Rendahnya penerapan PHBS berkontribusi terhadap munculnya penyakit berbasis lingkungan, sehingga memerlukan intervensi berkelanjutan melalui edukasi kesehatan, perbaikan akses air bersih, serta penguatan peran kader kesehatan dan puskesmas.

#### **f. Kesehatan Ibu dan Anak**

Pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kampung Hiripau umumnya dilaksanakan melalui kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu). Posyandu berfungsi sebagai layanan preventif dan promotif, yang meliputi pemeriksaan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, pelayanan kesehatan lansia, serta penyuluhan kesehatan dasar. Kegiatan ini didukung oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Mapurujaya yang datang secara berkala, serta dibantu oleh kader kesehatan kampung.

Namun demikian, frekuensi dan cakupan pelayanan posyandu masih terbatas, karena kegiatan umumnya hanya dilakukan satu kali dalam sebulan atau bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan dari luar kampung. Keterbatasan sarana, prasarana, dan peralatan medis juga membatasi kualitas layanan yang dapat diberikan. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan layanan kesehatan ibu dan anak belum sepenuhnya terpenuhi, terutama untuk kasus yang memerlukan pemantauan intensif, pengobatan rutin atau penanganan medis darurat.

### **3. Gizi**

Pemenuhan gizi masyarakat Kampung Hiripau hingga saat ini sebagian besar bergantung pada ketersediaan pangan lokal. Sumber karbohidrat utama berasal dari

sagu, ubi, dan pangan lokal lainnya, sementara sumber protein hewani diperoleh dari ikan, udang, kepiting, serta hasil tangkapan perairan sekitar. Ketergantungan pada pangan lokal ini mencerminkan kedekatan masyarakat dengan lingkungan alam, namun konsumsi pangan yang harus dibeli dari luar kampung, seperti beras, ayam, dan telur, masih relatif terbatas akibat keterbatasan daya beli masyarakat.

Upaya perbaikan gizi telah dilakukan melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil yang dilaksanakan dalam kegiatan posyandu. Meskipun demikian, variasi konsumsi pangan rumah tangga masih rendah dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip gizi seimbang. Kondisi ini berpotensi berdampak pada status gizi anak dan kesehatan ibu dalam jangka panjang, sehingga diperlukan penguatan edukasi gizi, diversifikasi pangan lokal, serta dukungan program lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan dan kualitas gizi masyarakat Kampung Hiripau.

#### **4. Keluarga Berencana**

Pemahaman masyarakat Kampung Hiripau terhadap program Keluarga Berencana (KB) pada umumnya masih berada pada tahap dasar. KB dipahami terutama sebagai upaya mengatur jarak kelahiran dan membatasi jumlah anak demi menjaga kesehatan ibu serta meringankan beban ekonomi keluarga. Kesadaran awal ini menunjukkan penerimaan normatif terhadap konsep KB, namun belum berkembang menjadi praktik yang konsisten dan berkelanjutan di tingkat keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, masih kuat pandangan bahwa memiliki banyak anak dengan jarak kelahiran yang dekat bukanlah persoalan penting, sehingga urgensi KB belum dirasakan secara luas.

Dari sisi layanan, penerapan KB di Kampung Hiripau menghadapi kendala aksesibilitas. Layanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) umumnya diperoleh melalui Puskesmas Mapurujaya, baik dengan mendatangi fasilitas di ibu kota distrik maupun saat kegiatan pelayanan kesehatan keliling yang tidak berlangsung rutin. Kondisi ini menuntut waktu tempuh dan biaya tambahan, sehingga menurunkan minat pasangan usia subur untuk memanfaatkan layanan KB secara teratur. Akibatnya, pemeriksaan berkala dan penggunaan alat kontrasepsi sering tidak berkelanjutan.

Selain keterbatasan akses, faktor informasi dan pengetahuan juga menjadi tantangan utama. Penyuluhan KB belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat

terutama pasangan usia subur dan generasi muda, sehingga pemahaman tentang jenis kontrasepsi, manfaat jangka panjang KB, serta dampaknya bagi kesehatan ibu dan anak masih terbatas. Keraguan terhadap efek samping alat kontrasepsi masih ditemukan dan memperlemah tingkat penerimaan. Kondisi ini berkontribusi pada rendahnya praktik KB, meskipun layanan tersedia melalui Puskesmas Mapurujaya.

Aspek peran gender tradisional turut mempengaruhi rendahnya partisipasi KB. Keputusan terkait jumlah anak dan penggunaan kontrasepsi lebih banyak ditentukan oleh pihak laki-laki, sementara Perempuan yang menanggung beban kehamilan, persalinan, dan pengasuhan memiliki ruang keputusan yang terbatas. Situasi ini menghambat kemandirian perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi dan memperkuat persepsi bahwa KB tidak mendesak.

Secara keseluruhan, keberhasilan program KB di Kampung Hiripau tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan peningkatan kesadaran keluarga. Karena itu, diperlukan penguatan penyuluhan dan pendampingan keluarga yang berkelanjutan dan sensitif budaya, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama serta kader kesehatan kampung sebagai agen perubahan. Dengan edukasi yang lebih intensif, peningkatan akses layanan melalui Puskesmas Mapurujaya, serta pelibatan aktif seluruh anggota keluarga, program KB diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi langsung pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, ketahanan keluarga, dan kualitas hidup masyarakat Kampung Hiripau secara berkelanjutan.

## **F. Ekonomi Masyarakat**

### **1. Aktivitas Penduduk**

Aktivitas ekonomi utama penduduk Kampung Hiripau bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam lokal dan bersifat subsisten. Masyarakat melakukan kegiatan berkebun, menangkap ikan, serta memanfaatkan hasil hutan dan perairan secara sederhana. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi sagu, ikan, udang, kepiting, serta hasil kebun seperti ubi, pisang dan sayur-sayuran. Aktivitas ini berlangsung hampir sepanjang tahun dan melibatkan anggota keluarga, dengan kepala keluarga berperan sebagai pencari nafkah utama.

Selain sektor primer tersebut, sebagian kecil masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi informal seperti perdagangan skala kecil melalui kios, buruh pelabuhan (TKBM) saat kapal sandar, pekerjaan harian lepas, serta usaha tambahan rumah tangga seperti menjual hasil kebun atau ikan segar. Terdapat pula keterlibatan terbatas pada sektor jasa dan pekerjaan formal (ASN, guru, tenaga honorer), namun jumlahnya kecil dan bergantung pada penempatan dari luar kampung. Secara keseluruhan, struktur aktivitas ekonomi ini mencerminkan keragaman kegiatan yang masih didominasi oleh sektor informal, tidak tetap, dan berisiko tinggi terhadap faktor cuaca dan musim.

Dominasi sektor subsisten dan informal menyebabkan pendapatan rumah tangga cenderung tidak stabil dan memiliki nilai tambah ekonomi yang rendah. Ketergantungan pada sumber daya alam tanpa pengolahan lanjutan membatasi peluang peningkatan kesejahteraan. Keterlibatan remaja dan anak usia sekolah sebagai buruh pelabuhan menunjukkan tekanan ekonomi jangka pendek yang berpotensi mengorbankan pendidikan. Diperlukan strategi diversifikasi usaha dan peningkatan nilai tambah berbasis potensi lokal agar struktur ekonomi menjadi lebih resilien.

## **2. Kepemilikan Modal**

Kepemilikan modal ekonomi masyarakat Kampung Hiripau secara umum masih sangat terbatas. Modal utama berupa lahan ulayat/kebun keluarga serta alat kerja sederhana seperti parang, jaring, perahu kecil, dan peralatan tangkap tradisional. Kepemilikan aset produktif modern, mesin pengolahan, sarana pascapanen, maupun teknologi pendukung usaha sangat minim.

Sebagian kecil masyarakat memiliki aset tambahan seperti perahu bermotor, sepeda motor atau kios kecil. Namun, keterbatasan modal finansial dan peralatan ini menjadi kendala utama untuk meningkatkan skala usaha, produktivitas dan nilai tambah hasil produksi. Akses terhadap pembiayaan formal juga terbatas karena ketiadaan agunan dan lembaga pendukung di tingkat kampung.

Rendahnya kepemilikan modal memperkuat karakter ekonomi subsisten dan menghambat transformasi usaha dari konsumsi rumah tangga menuju produksi komersial. Tanpa dukungan modal dan teknologi, masyarakat sulit meningkatkan efisiensi, kualitas dan daya saing produk. Intervensi berupa akses pembiayaan mikro, bantuan alat produksi, dan pelatihan kewirausahaan menjadi krusial untuk memutus siklus keterbatasan modal.

### **3. Kelembagaan Ekonomi**

Kelembagaan ekonomi di Kampung Hiripau belum berkembang secara optimal. Hingga saat ini belum terdapat koperasi kampung atau lembaga ekonomi formal yang berfungsi sebagai wadah usaha bersama, simpan pinjam, pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Aktivitas ekonomi masih berlangsung secara individual atau berbasis keluarga, tanpa koordinasi dan skala ekonomi yang memadai.

Ketiadaan kelembagaan ekonomi menyebabkan masyarakat sulit mengakses permodalan, pendampingan usaha, dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Akibatnya, hasil produksi dijual dalam bentuk mentah dengan harga rendah dan posisi tawar yang lemah. Ke depan, pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi kampung (koperasi/BUMDes/unit usaha bersama) menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Tanpa kelembagaan ekonomi, upaya pemberdayaan berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat dapat menjadi instrumen untuk mengonsolidasikan produksi, meningkatkan akses modal, memperluas pasar, dan mengelola risiko. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan ekonomi kampung perlu diprioritaskan, disertai pendampingan manajerial dan kemitraan lintas pihak, agar transformasi ekonomi Kampung Hiripau dapat berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan.

### **4. Harga Barang dan Bahan Makanan**

Ketersediaan barang dan bahan makanan di Kampung Hiripau pada umumnya masih bergantung pada pasokan dari luar kampung, baik melalui kios-kios kecil yang ada di dalam kampung maupun dengan membeli langsung dari kampung lain, pusat distrik hingga Kota Timika. Namun demikian, akses transportasi menuju Kampung Hiripau relatif mudah dan lancar, terutama melalui jalur darat yang menghubungkan kampung dengan pusat distrik dan Kota Timika. Kondisi ini membuat distribusi barang kebutuhan pokok dapat berlangsung secara rutin tanpa hambatan berarti.

Dengan dukungan akses transportasi yang baik tersebut, faktor cuaca tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kelancaran pasokan barang, berbeda dengan kampung-kampung terpencil yang sangat bergantung pada transportasi air atau udara. Akibatnya harga barang dan bahan makanan pokok di Kampung Hiripau cenderung stabil dan tidak jauh berbeda dengan harga di Kota Timika. Perbedaan

harga yang ada umumnya masih dalam batas wajar dan lebih dipengaruhi oleh biaya angkut serta ketersediaan barang pada waktu tertentu.

Secara keseluruhan, ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kampung Hiripau dapat dipenuhi secara berkelanjutan melalui kios-kios kampung maupun pasokan dari luar wilayah. Masyarakat tidak menghadapi masalah kelangkaan barang dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bahwa dari sisi logistik dan distribusi, Kampung Hiripau berada pada posisi yang cukup strategis dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih terjamin.

Beberapa harga bahan dan makan pokok di kampung Hiripau seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6. Distribusi Harga Bahan Pokok Kampung Hiripau  
Tahun 2025

| No. | Bahan Pokok        | Harga (Rp)      | Satuan  |
|-----|--------------------|-----------------|---------|
| 1.  | Beras              | 13.000 – 20.000 | kg      |
| 2.  | Minyak Goreng      | 25.000          | liter   |
| 3.  | Gula               | 20.000          | kg      |
| 4.  | Sayuran            | 5,000           | ikat    |
| 5   | Bensin             | 15,000          | liter   |
| 6   | Buah pisang        | 25.000          | sisir   |
| 7   | Buah salak         | 20.000          | kantong |
| 8   | Kopi               | 2,500           | sachet  |
| 9   | Rokok Surya 12     | 28.000          | bungkus |
| 10  | Air mineral 600 ml | 5.000           | botol   |

Sumber: Data Primer, 2025

## 5. Potensi dan Peluang Ekonomi

Kampung Hiripau memiliki potensi ekonomi yang cukup besar yang bersumber dari kekayaan alam di sekitarnya, terutama pada sektor perikanan perairan sungai dan pesisir, hasil hutan non-kayu, serta pertanian tradisional. Keberadaan sungai, hutan sagu, serta lahan kebun masyarakat menjadi basis utama aktivitas ekonomi kampung yang telah berlangsung secara turun-temurun dan relatif berkelanjutan.

Potensi tersebut membuka peluang untuk pengembangan usaha berbasis pengolahan, seperti pengolahan sagu menjadi produk pangan bernilai tambah, pengolahan ikan segar menjadi ikan asap atau olahan sederhana, serta pemanfaatan hasil kebun untuk kebutuhan pasar lokal. Dengan letak Kampung Hiripau yang relatif dekat dan mudah diakses dari pusat distrik dan Kota Timika, peluang pemasaran

produk lokal sebenarnya cukup terbuka apabila didukung oleh sistem produksi dan distribusi yang lebih baik.

Namun demikian, pengembangan potensi ekonomi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal usaha, teknologi pengolahan yang masih sederhana, minimnya pendampingan teknis, serta lemahnya akses pasar yang terorganisasi. Aktivitas ekonomi masih berjalan secara individual dan subsisten, sehingga potensi nilai tambah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi terarah berupa penguatan kapasitas masyarakat, dukungan permodalan, serta pembentukan kelembagaan ekonomi kampung.

## **6. Tingkat Kesejahteraan**

Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat Kampung Hiripau masih berada pada kategori menengah ke bawah. Pendapatan rumah tangga bersifat tidak tetap dan fluktuatif, karena sangat bergantung pada hasil kebun, hasil tangkapan ikan, serta peluang kerja informal seperti buruh pelabuhan atau pekerjaan harian lepas. Ketergantungan pada alam dan musim menyebabkan ketidakpastian pendapatan dalam jangka panjang.

Sebagian masyarakat masih mengandalkan bantuan pemerintah, seperti bantuan sosial dan program-program kampung, untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Bantuan tersebut menjadi penopang penting, namun belum mampu secara signifikan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Keterbatasan tabungan dan aset produktif membuat rumah tangga rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kebutuhan kesehatan mendesak atau penurunan hasil produksi alam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Hiripau memerlukan intervensi pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi lokal. Penguatan kelembagaan ekonomi kampung, peningkatan akses permodalan, pendampingan usaha produktif, serta penciptaan lapangan kerja lokal menjadi kunci penting untuk mendorong peralihan dari ekonomi subsisten menuju ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing.

## **G. Keamanan dan Ketertiban**

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kelancaran pelaksanaan pembangunan kampung.

Di Kampung Hiripau, kondisi keamanan yang relatif kondusif telah mendorong masyarakat untuk beraktivitas secara produktif, menumbuhkan rasa aman, serta memperkuat kohesi sosial antarwarga. Stabilitas keamanan ini juga tidak terlepas dari peran aktif aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, serta dukungan aparat keamanan di tingkat distrik.

### **1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban**

Secara umum, situasi keamanan di Kampung Hiripau tergolong relatif aman dan terkendali. Gangguan ketertiban yang terjadi umumnya bersifat insidental dan ringan, seperti konflik antar individu, perkelahian kecil, serta persoalan yang dipicu oleh konsumsi minuman keras. Kejadian-kejadian tersebut sebagian besar melibatkan kalangan pemuda dan terjadi pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada malam hari atau saat berlangsung kegiatan sosial.

Selain itu, potensi gangguan ketertiban juga muncul dari perselisihan keluarga, perbedaan pendapat antar warga, serta sengketa kecil terkait batas lahan atau pemanfaatan sumber daya. Meskipun jarang berkembang menjadi konflik terbuka, kondisi ini tetap memerlukan kewaspadaan. Hingga saat ini, belum terdapat kasus kriminal berat yang mengganggu stabilitas kampung secara signifikan. Namun, keterbatasan penerangan jalan dan belum adanya sistem keamanan kampung yang terorganisir menjadi faktor kerentanan yang perlu diantisipasi ke depan.

### **2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban**

Penanganan persoalan keamanan dan ketertiban di Kampung Hiripau pada umumnya dilakukan melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Pemerintah kampung bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat berperan aktif menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan dialog, yang terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah eskalasi konflik.

Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat kampung, maka penanganan dilanjutkan dengan melibatkan aparat keamanan distrik, khususnya Polsek Mimika Timur dan Koramil 1710-07/Mapurujaya. Polsek Mimika Timur menjalankan fungsi kepolisian, penegakan hukum, serta patroli keamanan, sementara Koramil 1710-07/Mapurujaya berperan dalam pembinaan teritorial dan dukungan keamanan bersama Polri. Sinergi kedua institusi ini dengan pemerintah kampung dan

tokoh masyarakat menjadi penopang utama kondusivitas keamanan di wilayah Mimika Timur.

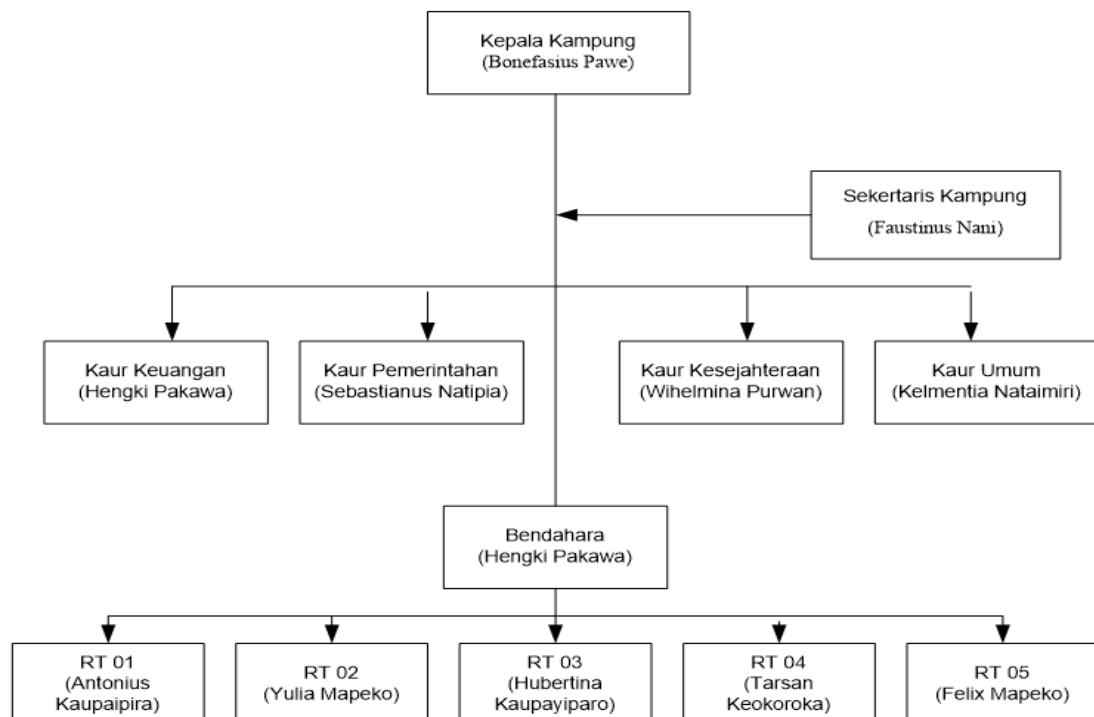
## H. Kelembagaan Kampung

### 1. Lembaga Pemerintah

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kampung Hiripau dipimpin oleh Kepala Kampung Bonefasius Pawe yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Kepala Kampung dibantu oleh Sekretaris Kampung Faustinus Nani, yang berperan dalam koordinasi administrasi dan tata kelola pemerintahan kampung.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis pemerintahan, Kepala Kampung dibantu oleh para Kepala Urusan (Kaur), yaitu Kaur Keuangan Hengki Pakawa, Kaur Pemerintahan Sebastianus Natipia, Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Wihelmina Purwan, serta Kaur Perencanaan dan Umum Klementia Nataimiri. Struktur ini berfungsi untuk memastikan pengelolaan keuangan, pelayanan sosial, perencanaan pembangunan, dan administrasi kampung berjalan secara efektif. Struktur ini digambarkan secara visual sebagai berikut:

Gambar 3.1. Struktur Pemerintahan Kampung Hiripau



Pada tingkat kewilayahan, struktur pemerintahan kampung dilengkapi dengan Kepala Dusun Yermias Natipia serta lima Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak pelayanan dan koordinasi langsung dengan masyarakat. Kelima Ketua RT tersebut adalah RT 01 Antonius Kaukapaipira, RT 02 Yulia Mapeko, RT 03 Hubertina Kaokapaiyiparo, RT 04 Tarsan Keokoroka, dan RT 05 Felix Mapeko. Perangkat kewilayahan ini berperan penting dalam pendataan penduduk, penyampaian informasi, serta penanganan persoalan sosial di tingkat lingkungan.

Selain pemerintah kampung, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjadi mitra Kepala Kampung dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan strategis. Susunan BPD Kampung Hiripau terdiri atas Ketua Herman Yatowau, Sekretaris Wellem Pawe, serta dua orang anggota, yaitu Anggota I Emilius Kaonakoka dan Anggota II Bonefasius Kaonakoka.

## **2. Lembaga Kemasyarakatan**

Lembaga kemasyarakatan di Kampung Hiripau terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Rukun Tetangga (RT), tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Keberadaan lembaga kemasyarakatan ini menjadi sarana utama partisipasi warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan, sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah kampung dan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dalam konteks lokal, Kampung Hiripau juga memiliki lembaga adat setempat yang berfungsi menjaga tatanan sosial berbasis kearifan lokal. Lembaga adat ini tidak selalu berbentuk organisasi formal, tetapi hidup dan dijalankan melalui struktur kekerabatan, marga, serta peran kepala suku dan tua adat. Lembaga adat memiliki otoritas moral dan sosial dalam mengatur norma kehidupan bersama, pengelolaan hak ulayat, serta penyelesaian persoalan adat dan sosial di lingkungan masyarakat.

Peran tokoh adat masih sangat penting, terutama dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal, memperkuat identitas masyarakat, serta menyelesaikan konflik secara kekeluargaan dan musyawarah. Tokoh adat sering menjadi penengah dalam konflik internal, baik yang berkaitan dengan persoalan keluarga, batas lahan, maupun

pelanggaran norma adat. Pendekatan adat ini terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih luas.

Sementara itu, tokoh agama berperan dalam pembinaan moral, etika, dan kehidupan spiritual masyarakat, serta menjadi rujukan dalam membangun sikap toleransi dan kedamaian. Kelompok perempuan dan pemuda mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, seperti kegiatan keagamaan, gotong royong, dan kegiatan kampung lainnya. Namun demikian, keterlibatan mereka belum terorganisir secara formal dan berkelanjutan, sehingga ke depan diperlukan penguatan kapasitas dan kelembagaan agar peran perempuan dan pemuda dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung Hiripau.

### **3. Lembaga Politik**

Masyarakat Kampung Hiripau menunjukkan perilaku politik yang cukup matang dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilkada Tahun 2024. Warga kampung secara aktif hadir dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat serta komitmen yang kuat terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.

Dinamika politik di Kampung Hiripau terasa lebih kuat dan intensif dibandingkan kampung-kampung lain, seiring dengan jumlah penduduk yang relatif besar serta letak kampung yang dekat dengan pusat kota. Kondisi ini menjadikan Kampung Hiripau sebagai wilayah strategis dan potensial bagi partai politik, baik dalam kegiatan sosialisasi, konsolidasi dukungan, maupun mobilisasi pemilih selama tahapan pemilu.

Pelaksanaan pemilu di Kampung Hiripau berjalan aman, tertib, dan lancar berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, yakni KPU Mimika, PPD Distrik Mimika Timur, KPPS Kampung Hiripau, pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan partai politik. Sinergi tersebut menciptakan suasana yang kondusif dan memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Kolaborasi lintas aktor tersebut juga berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan transparansi selama proses pemungutan hingga penghitungan suara. Kondisi ini memperkuat kepercayaan masyarakat Kampung Hiripau terhadap

mekanisme demokrasi, sekaligus menunjukkan bahwa kampung ini memiliki modal sosial dan politik yang kuat dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

#### **4. Lembaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas)**

Keamanan dan ketertiban masyarakat di Kampung Hiripau dijaga melalui kerja sama antara aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat keamanan di tingkat distrik. Hingga saat ini, kampung belum memiliki lembaga keamanan formal seperti pos keamanan kampung atau satuan pengamanan swakarsa. Meskipun demikian, kondisi keamanan relatif terkendali karena adanya koordinasi yang cukup baik dengan Polsek Mimika Timur yang berkedudukan di wilayah Mapurujaya, serta dukungan teritorial dari Koramil 1710-07/Mapurujaya.

Penanganan persoalan keamanan dan ketertiban di Kampung Hiripau pada umumnya dilakukan melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Aparat kampung bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat berperan aktif menyelesaikan konflik ringan, perselisihan keluarga, maupun gangguan ketertiban melalui musyawarah dan dialog. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih luas. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat kampung, maka kasus tersebut dilaporkan dan ditangani oleh Polsek Mimika Timur, sesuai dengan kewenangan penegakan hukum.

Dari sisi analisis, keberadaan Polsek Mimika Timur dan Koramil 1710-07/Mapurujaya menjadi penopang utama stabilitas keamanan Kampung Hiripau, meskipun tidak terdapat pos keamanan permanen di dalam kampung. Polsek berperan dalam penanganan gangguan kamtibmas dan penegakan hukum, sementara Koramil berkontribusi melalui pembinaan teritorial dan dukungan keamanan bersama aparat kepolisian.

Ke depan, penguatan sistem keamanan kampung perlu diarahkan pada pencegahan yang lebih terstruktur, antara lain melalui pembentukan mekanisme keamanan berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran warga terhadap ketertiban umum, serta penguatan koordinasi rutin dengan Polsek dan Koramil, guna menciptakan rasa aman yang berkelanjutan dan mendukung aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat Kampung Hiripau.

## I. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung Hiripau. Kondisi sarana dan prasarana juga mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan kampung yang berkelanjutan.

### 1. Transportasi dan Komunikasi

Akses transportasi menuju Kampung Hiripau pada umumnya sudah dapat dijangkau dengan cukup lancar melalui jalur darat, terutama untuk mobilitas keluar dan masuk kampung menuju pusat distrik Mapurujaya maupun Kota Timika. Jalur darat menjadi akses utama bagi masyarakat dan keluarga untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk keperluan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Meskipun masih terdapat beberapa ruas jalan lingkungan di dalam kampung yang belum seluruhnya diperkeras atau diaspal, kondisi tersebut tidak secara signifikan menghambat akses keluar–masuk kampung, karena jalan utama penghubung antarwilayah berada dalam kondisi relatif baik.



Angkutan umum Timika-Hiripau PP (dok.ippm)

Sementara itu, transportasi air melalui Sungai Wania tetap digunakan oleh masyarakat, namun lebih berfungsi sebagai sarana mobilitas antar kampung di sepanjang sungai serta untuk aktivitas ekonomi tradisional, seperti mencari ikan dan mengangkut hasil tangkapan. Perahu atau mesin tempel (jhonson) menjadi moda transportasi air yang umum digunakan, meskipun jumlahnya terbatas dan lebih bersifat penunjang, bukan sebagai akses utama kampung.



Loangboat dan Speedboat di Hiripau (dok.ippm)

Dari sisi komunikasi, jaringan telepon seluler telah tersedia di Kampung Hiripau dan dapat dimanfaatkan untuk komunikasi dasar. Namun demikian, kualitas sinyal belum merata dan cenderung tidak stabil di seluruh wilayah kampung. Akses internet

masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat, khususnya untuk mendukung kegiatan pendidikan, pelayanan administrasi kampung, serta pengembangan aktivitas ekonomi berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses fisik Kampung Hiripau relatif baik, peningkatan kualitas infrastruktur jalan lingkungan dan jaringan komunikasi masih diperlukan untuk mendukung pembangunan kampung secara lebih menyeluruh.

## **2. Air Bersih dan Sanitasi**

Ketersediaan air bersih di Kampung Hiripau bersumber dari sumur gali, sumur bor, serta sumber air alami yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian rumah tangga telah memiliki akses air bersih sendiri, sementara sebagian lainnya masih bergantung pada fasilitas bersama atau mengambil air dari sumber terdekat.

Sistem sanitasi di Kampung Hiripau belum sepenuhnya memadai. Sebagian rumah tangga telah memiliki jamban keluarga, namun masih terdapat warga yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak dan melakukan buang air besar di tempat terbuka. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan kesehatan lingkungan, terutama pada musim hujan. Pemerintah kampung telah berupaya meningkatkan akses sanitasi melalui pembangunan MCK umum, namun cakupannya masih terbatas.

## **3. Penerangan / Energi**

Sumber penerangan di Kampung Hiripau berasal dari listrik PLN, dan saat ini seluruh rumah penduduk telah mendapatkan pasokan listrik selama 24 jam. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kampung Hiripau telah terintegrasi dengan jaringan kelistrikan Distrik Mapurujaya dan tidak termasuk wilayah yang belum teraliri listrik. Ketersediaan listrik tersebut memberikan dukungan penting bagi aktivitas rumah tangga, proses pendidikan anak di rumah, serta pengembangan kegiatan ekonomi skala kecil di tingkat kampung.

Namun demikian, dari sisi kualitas dan pemanfaatan, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu mendapat perhatian. Penerangan jalan umum (PJU) masih sangat terbatas, sehingga pada malam hari sebagian wilayah kampung berada dalam kondisi gelap. Keterbatasan PJU ini berdampak pada keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama bagi mobilitas warga pada malam hari dan potensi gangguan ketertiban. Selain itu, kualitas jaringan dan instalasi listrik belum merata di seluruh

lingkungan kampung, serta masih terdapat gangguan listrik sesekali akibat faktor teknis jaringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses listrik sudah tergolong baik, peningkatan pada aspek pemerataan jaringan dan penyediaan PJU tetap diperlukan untuk mendukung kualitas hidup dan rasa aman masyarakat Kampung Hiripau secara berkelanjutan.

#### **4. Pendidikan**

Sarana pendidikan di Kampung Hiripau masih terbatas pada jenjang Sekolah Dasar (SD) yang berada di dalam kampung dan relatif mudah diakses oleh anak-anak usia sekolah dasar. Keberadaan SD ini menjadi penopang utama akses pendidikan dasar masyarakat Hiripau. Namun demikian, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA, peserta didik harus mengakses sekolah yang berada di Mapurujaya sebagai ibu kota distrik Mimika Timur. Kondisi ini menuntut anak-anak untuk menempuh jarak yang lebih jauh dari kampung, sehingga memerlukan kesiapan transportasi, biaya tambahan, serta dukungan orang tua yang lebih kuat.

Dari sisi analisis, keterbatasan sarana pendidikan lanjutan di dalam kampung berpotensi mempengaruhi tingkat kehadiran, motivasi belajar, dan keberlanjutan pendidikan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Risiko putus sekolah pada masa transisi dari SD ke SMP dan SMA menjadi lebih besar apabila tidak diimbangi dengan dukungan akses dan kebijakan afirmatif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kampung Hiripau memerlukan dukungan kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan, baik melalui penyediaan fasilitas pendidikan lanjutan yang lebih dekat, dukungan transportasi dan asrama siswa, maupun penguatan program pendampingan agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah dan lebih tinggi.

#### **5. Kesehatan**

Fasilitas kesehatan di Kampung Hiripau hingga saat ini belum tersedia secara memadai, karena tidak terdapat puskesmas maupun puskesmas pembantu (pustu) di dalam wilayah kampung. Pelayanan kesehatan di tingkat kampung umumnya masih bersifat terbatas, seperti kegiatan posyandu yang melayani ibu hamil, balita, dan lansia secara berkala. Untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih lengkap, masyarakat harus mengakses fasilitas kesehatan di luar kampung, terutama ke pusat distrik.

Dalam praktiknya, masyarakat Kampung Hiripau memperoleh pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Mapurujaya, yang berada di ibu kota Distrik Mimika Timur. Puskesmas Mapurujaya tersedia dan berfungsi aktif, dengan dukungan tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan, pengobatan, serta rujukan apabila diperlukan. Selain itu, petugas puskesmas juga secara berkala melakukan kunjungan pelayanan kesehatan ke kampung, seperti pemeriksaan malaria, imunisasi, dan pelayanan kesehatan dasar lainnya. Meskipun demikian, keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan di tingkat kampung tetap berdampak pada lambatnya penanganan kasus tertentu, terutama pada kondisi darurat. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas sarana kesehatan di Kampung Hiripau, baik melalui penguatan layanan keliling maupun penyediaan fasilitas kesehatan dasar di dalam kampung, menjadi **b** untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## **6. Ekonomi**

Sarana ekonomi di Kampung Hiripau hingga saat ini masih bersifat sederhana dan terbatas. Aktivitas perdagangan dilakukan melalui kios-kios kecil milik warga yang melayani kebutuhan pokok sehari-hari. Belum tersedianya pasar kampung sebagai pusat transaksi ekonomi menyebabkan masyarakat harus menjual hasil kebun, hasil perikanan, atau membeli kebutuhan lainnya ke kampung lain, pusat distrik, atau wilayah sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kampung belum terorganisasi secara optimal dan masih sangat bergantung pada jaringan ekonomi di luar kampung.

Keterbatasan sarana ekonomi tersebut berdampak langsung pada rendahnya nilai tambah hasil produksi masyarakat dan sempitnya peluang pengembangan usaha lokal. Produk hasil kebun dan perikanan umumnya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang relatif rendah, sementara peluang pengolahan dan pemasaran belum berkembang. Tanpa dukungan sarana dan infrastruktur ekonomi yang memadai, masyarakat kesulitan meningkatkan skala usaha dan pendapatan rumah tangga secara berkelanjutan.

Selain itu, Kampung Hiripau memiliki potensi kerajinan lokal seperti lukisan, tifa, rok tauri dan tas tradisional. Namun, hingga saat ini hasil kerajinan tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi para pengrajin. Hal ini terutama disebabkan oleh belum ada yang dapat memfasilitasi proses produksi,

promosi, dan pemasaran produk kerajinan lokal secara terorganisasi. Dalam kondisi riil, produk kerajinan lebih banyak dibuat untuk kebutuhan adat atau dijual secara terbatas pada momen tertentu.

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi Kampung Hiripau tidak cukup hanya bertumpu pada potensi produksi, tetapi memerlukan pengembangan sarana ekonomi dan kelembagaan pendukung, seperti pembentukan koperasi atau BUMDes, penyediaan ruang pemasaran produk lokal, serta pendampingan usaha dan akses pasar.



Produk Kerajinan Lokal (dok.ippm)

Dengan dukungan tersebut, hasil produksi dan kerajinan lokal berpeluang memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong kesejahteraan ekonomi Kampung Hiripau secara lebih berkelanjutan.

## 7. Peribadatan

Sarana peribadatan di Kampung Hiripau telah tersedia, namun dari sisi jumlah dan pemerataan masih tergolong terbatas. Rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial dan kebersamaan masyarakat. Bagi pemeluk agama tertentu yang belum memiliki sarana ibadah khusus di dalam kampung, kegiatan keagamaan masih dilaksanakan dengan mengakses kampung lain atau memanfaatkan rumah warga.

Keberadaan sarana peribadatan memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial, memperkuat nilai-nilai moral, serta menopang kehidupan spiritual masyarakat kampung. Mayoritas masyarakat Kampung Hiripau menganut agama Katolik, sehingga keberadaan gereja Katolik menjadi sangat sentral dalam kehidupan bermasyarakat.



Gereja Katolik St, Mijhael Hiripau (dok.ippm)

Dalam konteks tersebut Gereja Katolik Stasi Santo Mikhael Hiripau yang berada di bawah Paroki Santo Emmanuel Mapurujaya, Dekanat Mimika-Agimuga Keuskupan Timika, memiliki peran yang sangat penting. Gereja ini merupakan bangunan baru

yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten tahun 2022 dengan ukuran 20 x 30 meter. Keberadaan gereja ini tidak hanya memperkuat pelaksanaan ibadah keagamaan, tetapi juga menjadi ruang pertemuan sosial, pembinaan umat, serta penguatan solidaritas masyarakat, sehingga berkontribusi positif terhadap kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Kampung Hiripau.

## **8. Olahraga dan Rekreasi**

Kampung Hiripau hingga saat ini belum memiliki sarana olahraga dan rekreasi yang bersifat permanen dan memadai. Aktivitas olahraga masyarakat, khususnya pemuda dan anak-anak, umumnya dilakukan secara sederhana dengan memanfaatkan lahan terbuka, seperti tanah kosong di sekitar permukiman, halaman sekolah, atau area terbuka di dekat kampung. Kegiatan yang biasa dilakukan antara lain bermain sepak bola dan bola voli secara informal, tanpa dukungan fasilitas seperti lapangan permanen, gawang tetap, lantai lapangan maupun penerangan.

Dalam praktiknya, apabila masyarakat terutama pemuda membutuhkan fasilitas olahraga yang lebih layak, mereka mengakses lapangan olahraga yang berada di wilayah Mapurujaya atau pusat distrik, serta sesekali memanfaatkan fasilitas di Kota Timika. Namun akses ke luar kampung tersebut tidak dilakukan secara rutin karena keterbatasan waktu, biaya, dan sarana transportasi. Kondisi ini menyebabkan aktivitas olahraga dan rekreasi di Kampung Hiripau belum berkembang secara optimal dan cenderung bersifat insidental.

Secara analitis, ketiadaan sarana olahraga dan ruang terbuka publik di Kampung Hiripau membatasi ruang interaksi sosial yang positif, khususnya bagi generasi muda dan anak-anak. Padahal, keberadaan fasilitas olahraga dan rekreasi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, menyalurkan energi pemuda ke arah yang produktif, serta memperkuat kohesi sosial. Oleh karena itu, pengembangan lapangan olahraga kampung atau ruang terbuka publik multifungsi ke depan perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan Kampung Hiripau, agar kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

## BAGIAN IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG

### A. Infrastruktur Kampung Rasa Kota

Konsep infrastruktur kampung berstandar kota selaras dengan paradigma “membangun dari kampung ke kota”, yang menempatkan kampung sebagai fondasi pertumbuhan dengan memperkuat kualitas infrastrukturnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Gagasan membangun kampung rasa kota menjadi wujud praktisnya, yaitu menghadirkan pelayanan, kenyamanan dan aksesibilitas setara perkotaan tanpa menghilangkan identitas sosial, budaya dan kearifan lokal.

Kebutuhan infrastruktur kampung rasa kota di kampung Hiripau pada tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota  
Di Kampung Hiripau

| No | Komponen Infrastruktur                          | Kondisi Eksisting                                                                            | Kebutuhan Prioritas                                                                                  | OPD Penanggung Jawab                        |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Akses Air Bersih & Sambungan Pipa Rumah         | Semua rumah belum tersambung jalur pipa, belum ada distribusi air bersih semua rumah         | Penyelesaian sambungan rumah (SR) untuk seluruh KK, Peningkatan kapasitas dan kontinuitas suplai air | Dinas PUPR (Cipta Karya), Unit Air Bersih   |
| 2. | Puskesmas dan Fasilitas kesehatan               | Belum memiliki puskesmas dan fasilitas kesehatan lain                                        | Pembangunan Puskesmas dan penyediaan fasilitas kesehatan                                             | Dinas PUPR (Cipta Karya), Dinas kesehatan   |
| 3. | Saluran Drainase yang memadai                   | Belum ada drainase, sering terjadi banjir saat curah hujan tinggi dan mengenangi rumah warga | Pembangunan saluran drainase yang memadai                                                            | Dinas PUPR (Cipta Karya),                   |
| 4. | Sanitasi lingkungan                             | Masih ada rumah warga yang belum dilengkapi dengan MCK yang layak                            | Pembangunan MCK yang layak yang sesuai standar kesehatan                                             | Dinas PUPR (Cipta Karya), Dinas kesehatan   |
| 5. | Rumah hunian sesuai daya tampung                | Sebagian rumah dihuni oleh 4 sampai 5 keluarga                                               | Penambahan pembangunan unit rumah yang layak                                                         | Dinas PUPR (Cipta Karya),                   |
| 6. | Ruang Perpustakaan dan laboratorium sekolah     | Sekolah belum memiliki ruang perpustakaan dan laboratorium                                   | Pembangunan ruang perpustakaan dan laboratorium yang standar                                         | Dinas Pendidikan, Dinas PUPR (Cipta Karya)  |
| 7. | Pembangunan sekolah pada jenjang SMP            | Belum memiliki SMP                                                                           | Mendirikan SMP                                                                                       | Dinas Pendidikan, Dinas PUPR (Cipta Karya), |
| 8. | Fasilitas olahraga, Lapangan voly dan bola kaki | Belum memiliki fasilitas olahraga, lapangan voly dan bola kaki                               | Menyediakan lapangan voly dan bola kaki                                                              | Dinas PUPR, Distrik Mimika Timur            |

Sumber: Hasil FGD, 2025

### B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal

Pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam mewujudkan konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu memperkuat aktivitas ekonomi sejak level kampung agar menjadi fondasi

pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, potensi unggulan didorong untuk dikelola secara lebih profesional dengan dukungan fasilitas yang setara standar perkotaan mulai dari akses pasar modern, fasilitas penyimpanan layak, hingga pendampingan kelembagaan dan legalitas usaha tanpa menghilangkan identitas budaya dan nilai komunal masyarakat.

Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal di kampung Hiripau pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

**Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal  
Di kampung Hiripau**

| No | Komponen Infrastruktur                      | Kondisi Eksisting                                                                                    | Kebutuhan Prioritas                                                                                                                                                                     | OPD Penanggung Jawab                            |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Perikanan dan sarana penangkapan ikan       | Hiripau pemukiman sepanjang sungai Wania. Penangkapan ikan masih tradisional hasilnya tidak maksimal | Penambahan bantuan motor Jhonson kepada masyarakat. Penyediaan sarana tangkap sederhana dan ramah lingkungan. pendampingan teknis untuk meningkatkan produktivitas.                     | Dinas Perikanan, Distrik Mimika Timur           |
| 2. | Pasar tradisional                           | Belum ada pasar tradisional untuk memasarkan hasil perikanan, perkebunan dan pertanian.              | Pembangunan pasar tradisional                                                                                                                                                           | Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas PUPR |
| 3. | Teknologi sederhana pengelolaan buah pisang | Banyak tanaman pisang tapi tidak memberikan dampak peningkatan ekonomi                               | Penyediaan alat teknologi sederhana untuk pengelolaan pisang. Pelatihan dan pembinaan cara mengolah buah pisang untuk menjadi berbagai bentuk makanan olahan dengan bahan dasar pisang. | Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas PUPR |

Sumber: Hasil FGD, 2025

### **C. SDM, Budaya dan Lingkungan Berkelanjutan**

Penguatan SDM, budaya dan lingkungan berkelanjutan merupakan inti dari konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu menghadirkan kualitas hidup modern tanpa meninggalkan jati diri lokal. Melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pelestarian nilai budaya dan pengelolaan lingkungan yang sehat, kampung dapat tumbuh layak, maju dan berdaya saing, namun tetap berakar pada kearifan lokal dan harmoni alam.

Kebutuhan SDM, budaya dan lingkungan berkelanjutan di kampung Hiripau pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

**Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan  
Di kampung Hiripau**

| <b>No</b> | <b>Komponen Infrastruktur</b>                                               | <b>Kondisi Eksisting</b>                                                                                                                                                                    | <b>Kebutuhan Prioritas</b>                                                                                    | <b>OPD Penanggung Jawab</b>                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | Peningkatan kompetensi kader kesehatan dan kader posyandu                   | Layanan kesehatan dan posyandu belum maksimal karena kompetensi yang dimiliki kader belum memadai, selain itu keterbatasan sarana, tenaga kader, dan cakupan layanan ibu hamil serta balita | Program Pelatihan dan pendampingan bagi kader kesehatan. Penambahan jumlah kader kesehatan dan posyandu       | Dinas Kesehatan, Distrik Mimika Timur      |
| 2.        | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru                                 | Masih ada guru-guru yang belum berkualifikasi strata satu (S1) dan belum memiliki sertifikat pendidik                                                                                       | Memfasilitasi guru-guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan mengikut PPG (Pendidikan Profesi Guru) | Dinas Pendidikan                           |
| 3.        | Pelatihan dan pendampingan untuk keterampilan khusus bagi remaja dan pemuda | Banyak remaja dan pemuda putus sekolah yang tidak memiliki skil tertentu.                                                                                                                   | Penyediaan tempat dan faslitasi pelatihan dan pendampingan bagi remaja dan pemuda                             | Dinas pendidikan, Balai Diklat             |
| 4.        | Kemampuan literasi dan numerasi anak-anak                                   | Sebagian anak-anak belum lancar membaca dan menghitung                                                                                                                                      | Penyediaan buku-buku. Pendampingan bagi anak-anak putus sekolah                                               | Dians Pendidikan                           |
| 5.        | Gisi Anak                                                                   | Masih ada anak-anak kurang gisi.                                                                                                                                                            | Memberi makanan bergisi gratis                                                                                | Dinas Kesehatan, Badan Gisi Nasional (BGN) |
| 6.        | Guru sekolah                                                                | Sekolah masih kekurangan guru                                                                                                                                                               | Penambahan jumlah guru yang berkompeten                                                                       | Dinas pendidikan                           |

Sumber: Hasil FGD, 2025

## **BAGIAN V. PENUTUP**

Kampung Hiripau di Distrik Mimika Timur merupakan komunitas pesisir yang memiliki potensi alam dan budaya yang kuat, sekaligus menunjukkan dinamika sosial yang khas sebagai kampung yang berada dekat dengan pusat distrik dan Kota Timika. Secara bertahap, infrastruktur kampung terus mengalami perbaikan, terutama pada akses jalan darat yang relatif lancar, keterhubungan dengan pusat distrik Mapurujaya, serta ketersediaan listrik PLN 24 jam. Namun demikian, di tingkat lingkungan kampung masih dijumpai keterbatasan, khususnya pada jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, air bersih, sanitasi, serta kualitas hunian, yang hingga kini menjadi fokus utama kebutuhan pembangunan.

Dalam bidang ekonomi, masyarakat Kampung Hiripau memiliki modal produktif berbasis sumber daya lokal, terutama pada sektor perikanan tradisional, kebun keluarga, serta pemanfaatan sagu dan hasil pangan lokal. Aktivitas ekonomi masih didominasi sektor subsisten dan informal, dengan sarana ekonomi yang sederhana dan belum terorganisasi secara kelembagaan. Potensi UMKM dan kerajinan lokal seperti lukisan, tifa, rok tauri, dan tas tradisional telah ada, namun belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena keterbatasan pendampingan, permodalan, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan usaha, pembentukan kelembagaan ekonomi kampung, serta fasilitasi akses pasar menjadi kunci peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pada aspek pendidikan, Kampung Hiripau telah memiliki Sekolah Dasar di dalam kampung, yang mendukung akses pendidikan dasar. Namun untuk jenjang SMP dan SMA, peserta didik harus melanjutkan pendidikan ke Mapurujaya sebagai ibu kota distrik, yang menuntut dukungan transportasi dan pendampingan orang tua. Di sisi lain, pembinaan moral dan spiritual masyarakat berjalan cukup baik melalui pendidikan keagamaan dan peran aktif gereja, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai ruang sosial dan pembinaan karakter generasi muda. Nilai-nilai adat dan budaya lokal tetap dijaga dan tidak menjadi penghambat pendidikan formal.

Secara keseluruhan, Kampung Hiripau sedang berada dalam proses transisi menuju kampung yang lebih layak huni, produktif, dan terintegrasi dengan perkembangan wilayah perkotaan, tanpa kehilangan identitas dan nilai budaya setempat. Pendekatan

pembangunan yang menekankan prinsip “membangun dari kampung” dan “kampung rasa kota” tercermin dalam upaya mengintegrasikan penguatan infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi lokal, pengembangan sumber daya manusia, pelestarian budaya, serta pengelolaan lingkungan. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, tokoh adat dan agama, serta partisipasi aktif warga, Kampung Hiripau diharapkan tumbuh sebagai kampung pesisir yang maju, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus tetap berakar kuat pada kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kabupaten Mimika dalam Angka Tahun 2024*, Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Distrik Mimika Timur dalam Angka Tahun 2024*, Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2025). *Data Agregat Kependudukan (Semester I Tahun 2025)*. Dinas Dukcapil, Timika
- Republik Indonesia, (2014), *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.